

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
BUMDES**

(Studi Kasus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu)

Disusun untuk diajukan sebagai syarat melakukan skripsi



Oleh :

M. Anharul Asror

NIM. 1906016125

ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengkoreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama : M. Anharul Asror

NIM : 1906016125

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan BUMDES (Studi Kasus BUMDES Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Desember 2023

Pembimbing,


Masrohatun, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES

(Studi Kasus BUMDES Moroberkah Desa Mororejo)

Disusun Oleh

M. Anharul Asror

1906016125


Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 13
Desember 2024 dan telah dinyatakan lulus.

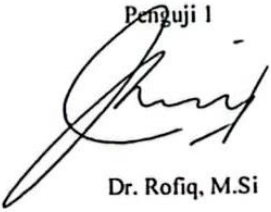
Susunan Dewan Penguji

Ketua

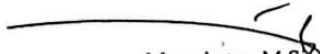
Nur Syamsudin, M.A
NIP.196805051995031002

Sekretaris


Masrohatun M.Si
NIP. 198806212018012001

Penguji I

Dr. Rofiq, M.Si
NIP. 197303052023211007

Pembimbing


Masrohatun M.Si
NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES (Studi Kasus BUMDES Moroberkah Desa Mororejo)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri secara penuh dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Kendal, 10 Desember 2023

Yang menyatakan



M. Anharul Asror

NIM. 1906016125

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk dan limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul sebagai berikut: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES (Studi Kasus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu)”**. Adapun maksud dan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini yaitu sebagai persyaratan guna memenuhi Ujian Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

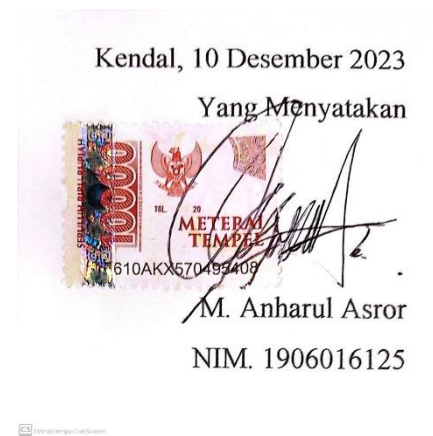
Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir skripsi ini, Penulis telah mencurahkan segala upaya, kemampuan, pengetahuan, serta melakukan penelitian lapangan. Namun Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu saya dalam hal nasehat, bimbingan dan semangat selama proses pelaksanaan penelitian lapangan hingga tujuan ini tercapai, antara lain kepada :

1. Allah SWT, Orang Tua, Saudara dan Adik yang selalu mengiringi doa disetiap langkah arah gerak penulis serta dukungan keluarga, baik dari segi materil maupun non-materil;
2. Bapak Prof.Dr.H. Imam Taufiq M.A.g. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
3. Ibu Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Ibu Masrohatun, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu selalu memberikan dukungan dan semangat serta

meluangkan pikiran maupun tenaga dalam memberikan pengarahan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;

6. Seluruh jajaran dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik 2019 D yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kendal yang telah memberikan motivasi dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi manfaat berdampak positif bagi penulis, pihak yang bersangkutan, dan pembaca. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan dikedepannya. Terimakasih atas pengarahan, bimbingan, dan Do'a yang sangat berarti bagi penulis.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Laporan Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua : Terimakasih untuk seluruh dukungan baik materi maupun moral, serta doa dan kasih sayang kepada saya dalam menjalani kehidupan saya

Alm. Kakek dan Nenek : Terimakasih untuk seluruh dukungan secara materi dan moral, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

Kakak dan adik tercinta : Terimakasih untuk seluruh dukungan, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

Teman-teman : Terimakasih untuk seluruh dukungan secara materi dan moral, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya.

MOTTO HIDUP

**“Sebaik-baiknya Manusia Adalah yang Paling
Bermanfaat Bagi Manusia Lain”**

(HR. AHMAD)

ABSTRAK

Berdasarkan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa manajemen pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola bottom up, agar lebih cepat terwujud kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Peraturan tersebut menjadi titik awal dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola potensi yang ada di desanya masing-masing. BUMDes Moroberkah merupakan Badan Usaha Milik Desa Mororejo yang menjadi Badan Usaha Terbaik se-Kabupaten Kendal. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan usahanya tentunya tidak lekang dari peran masyarakat dalam membantu mengembangkan Badan Usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUMDes Moroberkah, serta faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menyajikan data secara deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data melalui wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposive, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan fenomena data di lapangan dan dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo cukup baik. Masyarakat terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemanfaatan, dan evaluasi program kerja BUMDes Moroberkah. Keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kesadaran, keuntungan, *patronase klientelisme*, dan kontrol masyarakat dalam berjalanya organisasi.

Kata kunci : BUMDes, Pengembangan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Based on the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning villages, village government management is handed over completely and independently to the village through a bottom up pattern, so that the independence and welfare of village residents can be realized more quickly. This regulation is the starting point for the formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to manage the potential that exists in their respective villages. BUMDes Moroberkah is a Mororejo Village Owned Business Entity which is the Best Business Entity in Kendal Regency. The success of BUMDes in running their business is of course inseparable from the role of the community in helping to develop the Business Entity. This research aims to find out the process of community participation in developing BUMDes Moroberkah, as well as the factors that encourage the community to participate in developing BUMDes Moroberkah Mororejo Village.

This research uses qualitative research methods, presenting data descriptively through a case study approach. Data collection techniques include interviews with sources selected purposively, direct observation and documentation. Data analysis is based on data phenomena in the field and is linked to community participation theory.

The results of this research show that community participation in the development of BUMDes Moroberkah Mororejo Village is quite good. The community is actively involved starting from the planning, implementation, usefulness and evaluation stages of the Moroberkah BUMDes work program. Community involvement is also influenced by several things such as awareness, profits, patronage clientelism, and community control in the running of the organization.

Keywords: BUMDes, Development, Community Participation

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	xii
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Partisipasi Masyarakat.....	8
2. BUMDES	11
F. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
G. Sumber dan Jenis Data	17
H. Teknik Pengumpulan Data	17
I. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II.....	22
TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT	22
A. Partisipasi Masyarakat.....	22
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	26
BAB III	28
GAMBARAN UMUM BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO	28

A. Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	28
B. BUMDes Moroberkah Desa Mororejo	32
BAB 1V.....	41
PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO KECAMATAN KALIWUNGU	41
A. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	41
B. Partisipasi dalam Pelaksanaan	55
C. Partisipasi masyarakat dalam kemanfaatan	65
D. Partisipasi Dalam Evaluasi	71
BAB V.....	74
ALASAN YANG MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN BUMDES MORO BERKAH.....	74
A. Adanya kesadaran masyarakat.....	74
B. Partisipasi memberikan keuntungan kepada masyarakat.....	77
C. Adanya hubungan <i>patron-client</i>	83
E. Proses partisipatif menjamin kontrol masyarakat.	84
BAB VI.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Laporan Rugi Laba BUMDes Moro Berkah.....	3
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Mororejo Tahun 2019.....	9
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Mororejo2019.....	31
Tabel 3.4 Tabel Pengurus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu.....	34
Tabel 4.5 Rekap Kehadiran Rapat MUSDES dan LPJ BUMDes Moroberkah 1 Februari 2023.....	44
Tabel 4.6 Daftar masyarakat member pengambil sampah Desa Mororejo	56

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Klasifikasi BUMDes Se Kabupaten Kendal.....	4
Gambar 1.2 Data Klasifikasi BUMDes se Kecamatan Kaliwungu.....	4
Gambar 1.3 Klasifikasi BUMDes Moroberkah dan Indeks Desa Membangun Desa Mororejo.....	5
Gambar 3.4 Teori Cohen Uphoff.....	23
Gambar 3.5 Peta Wilayah Desa Mororejo.....	29
Gambar 3.6 Diagram Jumlah penduduk Desa Mororejo Berdasarkan jenis kelamin	30
Gambar 3.7 Struktur Pengurus BUMDes Moroberkah.....	33
Gambar 3.8 Pantai Ngebun.....	39
Gambar 4.9 Rapat tahunan BUMDes Moroberkah bersama dengan lembaga desa dan masyarakat 1 Februari 2023.....	42
Gambar 4.10 Daftar Hadir apat Kerja BUMDes Moroberkah 1 Februari 2023.....	46
Gambar 4.11 Daftar Pelaku Usaha Pantai Ngebun.....	63

Gambar 4.12 Penyerahan dana sosial BUMDes Moroberkah.....	69
Gambar 4.13 Penyerahan dana sosial BUMDes Moroberkah.....	69
Gambar 4.14 kondisi pada saat rapat evaluasi kepengurusan BUMDes Moroberkah pada 25 Desember 2022 tahun lalu.....	71
Gambar 5.15 Aktivitas pelaku usaha di sekitaran pantai ngebum.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi merupakan keterlibatan pikiran/mental, emosi, dan perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya dalam memberikan sumbangsuhnya dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, serta bertanggung jawab terhadap usaha yang diberikan Keith Davis dalam Sastropoetro (1988).

Partisipasi sangat berbeda dengan mobilisasi meskipun terkadang keduanya dicampuradukan untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah. Partisipasi tidak mengandung unsur paksaan/keharusan di dalamnya, sedangkan mobilisasi biasanya diiringi oleh paksaan oleh pemerintah atau pihak lain yang memiliki kekuatan lebih dari yang akan digerakan Mulyadi (2011).

Janabrota dalam Ndraha (1990) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangsuhnya dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program yang mana mereka juga memperoleh manfaat dari program-program tersebut, serta diikutsertakan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

Partisipasi juga berarti keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tidak terkecuali pembangunan desa, seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut dikarenakan desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan dimana desa menjadi ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Konstitusi telah mengamanahkan agar desa dapat mengelola pemerintahannya dan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya secara mandiri melalui kebijakan otonomi desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014. Setelah kebijakan *top down* diberlakukan selama bertahun-tahun lamanya, lahirnya UU No 6 Tahun 2014 menjadi titik awal perubahan menuju kemandirian desa. Dengan berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas Undang-Undang tersebut

memberikan kewenangan kepada desa bukan hanya sebagai objek pembangunan namun sebagai subjek pembangunan. Undang-undang desa memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur sendiri melalui kewenangan asal, kewenangan setingkat desa setempat, dan atribusi. Hal ini menjadikan desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil di garda depan pembangunan pemerintahan Indonesia.

Salah satu poin yang dijamin oleh UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya BUMDes/Desa. BUMDes adalah badan usaha dimana desa menyediakan seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa dan dipisahkan untuk mengelola harta, jasa, dan usaha lain untuk menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa UU Tentang Desa (2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUMdes diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa :

"Jika BUMDes mampu mengelola potensi ekonomi dan sumber daya dengan baik, maka kesejahteraan pasti tercapai. Saya yakin bahwa BUMDes adalah kunci dalam mempercepat peningkatan ekonomi dari desa," Tempo (2020).

BUMDes saat ini memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Seperti BUMDes yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Bumdes Mororejo atau yang diberi nama Bumdes Moroberkah merupakan Badan Usaha Milik Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Badan usaha ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun sejak awal berdirinya. Berawal dari adanya pelelangan bengkok dan portal karcis pantai ngebun yang merupakan pantai satu-satunya didesa mororejo, namun pemenang lelang mengundurkan diri pada 2019. Kemudian pemerintah desa mororejo melakukan musyawarah desa dan di dalamnya sepakat untuk mendirikan Bumdes mororejo yang diatur dalam

PERDES NO.08 Tahun 2019 tentang Pembentukan BUMDES MORO BERKAH dan tentang Jenis Usaha yang akan di kembangkan di Desa Mororejo (Berkah, 2022).

BUMDes Moroberkah memiliki 3 usaha yang sudah berjalan hingga saat ini yaitu Pengelolaan Wisata, Pengelolaan Unit Sampah, dan Pengelolaan Lapangan Desa. Dengan 3 usaha yang dikembangkan itu, BUMDES Moroberkah bisa mendapatkan sekitar 50-300 juta perbulan dan mampu mencapai 1 milyar lebih pertahun. Berikut ini laporan keuangan BUMDes Moroberkah per 31 Desember 2022 :

Tabel 1.1
Laporan Rugi Laba BUMDes Moro Berkah

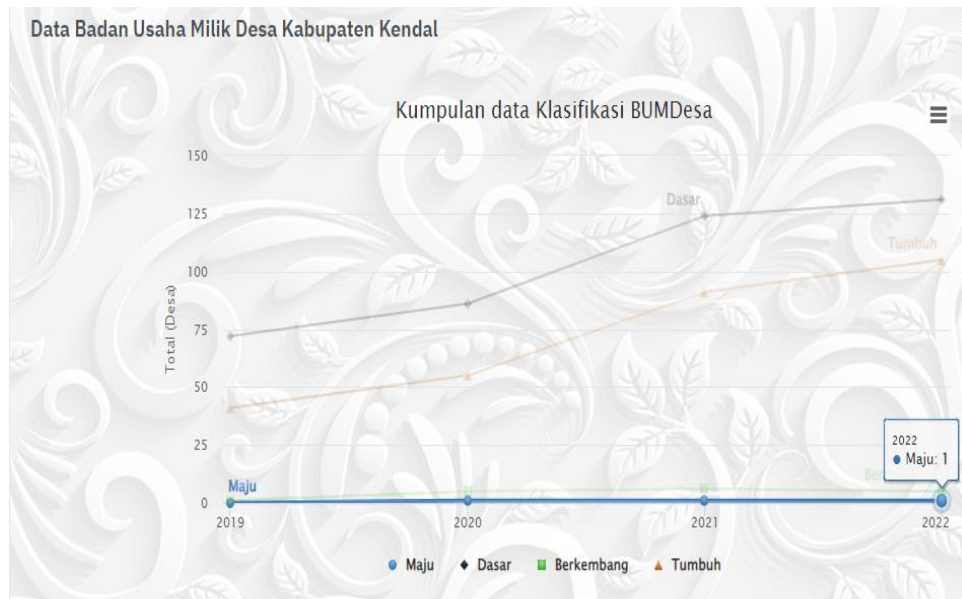
DESA MOROREJO KEC. KALIWUNGU		31 DESEMBER 2022		
URAIAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
A. PENDAPATAN				
1). Pendapatan Operasional				
* Pendapatan Pengelolaan Wisata desa	1,319,365,000	101,900,000	1,421,265,000	
* Pendapatan Pengelolaan Sampah	216,215,000	20,510,000	236,725,000	
* Pendapatan Pengelolaan Lapangan	7,000,000	-	7,000,000	
* Pendapatan Pengelolaan Pasar Malam	-	-	-	
* Pendapatan Pengelolaan Lain-lain	9,900,000	13,245,000	23,145,000	
* Total Pendapatan Operasional	1,552,480,000	135,655,000	1,688,135,000	
2). Pendapatan Non Operasional				
* Bunga Bank Operasional BUMDES	1,139,735	120,221	1,259,956	
* Pendapatan Non Operasional Lain-lain	-	-	-	
* Total Pendapatan Non Operasional	1,139,735	120,221	1,259,956	
TOTAL PENDAPATAN	1,553,619,735	135,775,221	1,689,394,956	

Sumber : (Berkah, 2022)

Secara statistik berdasarkan data dari SIDESA Jawa Tengah (2022) BUMDes Moroberkah menjadi satu satunya BUMDes yang masuk dalam kategori maju dibanding BUMDes lain yang masih berkembang atau sedang merintis. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana proses partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan BUMDes Moroberkah ini.

Gambar 1.1

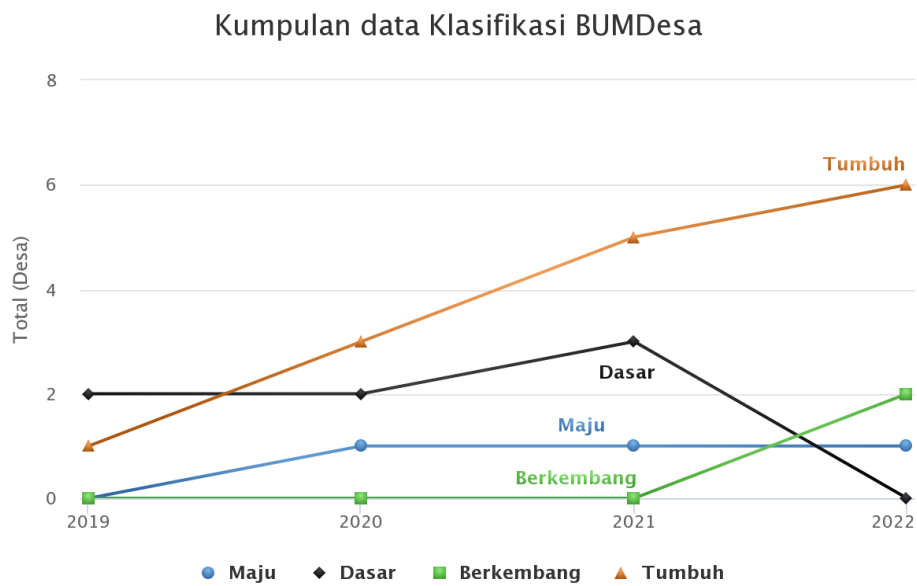
Klasifikasi BUMDes Se Kabupaten Kendal



Sumber : (Si Desa JATENG, 2022)

Gambar 1.2

Data Klasifikasi BUMDes se Kecamatan Kaliwungu



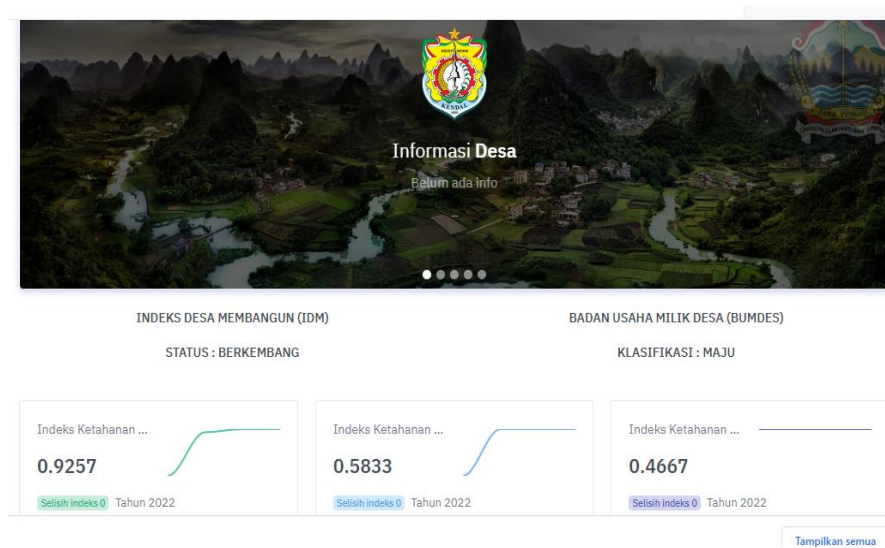
Sumber : (Si Desa JATENG, 2022)

Gambar di atas menunjukkan statistik jumlah BUMDes di Kabupaten Kendal yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya, mulai dari tumbuh hingga maju. Dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2022 terdapat 127 BUMDes dengan klasifikasi Dasar, kemudian 102 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh, dan 1 BUMDes dengan klasifikasi maju. Satu-satunya BUMDes di Kabupaten Kendal yang memiliki klasifikasi maju adalah BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kaliwungu. Kerjasama yang baik antara BUMDes dengan masyarakat dan kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang ada menjadikan BUMDes mroberkah mampu memperoleh pendapatan cukup banyak setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan BUMDes Moroberkah sebagai *role model* BUMDes lain di Kabupaten Kendal.

Kemampuan BUMDes dalam mengembangkan potensi desa tentunya tidak luput dari peran masyarakat di dalamnya. Peran serta dan keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh penting guna mendorong perubahan yang nantinya akan berdampak baik kepada masyarakat.

Gambar 1.3

Klasifikasi BUMDes Moroberkah dan Indeks Desa Membangun Desa Mororejo



Sumber : (Si Desa JATENG, 2022)

Berdasarkan data di atas, bahwa BUMDes Moroberkah menjadi satu-satunya BUMDes dengan Klasifikasi Maju di Kecamatan Kaliwungu dan di Kabupaten Kendal. Data tersebut juga dapat diartikan bahwa BUMDes Moroberkah memiliki keunggulan yang dinilai dari berbagai aspek. Untuk menentukan klasifikasi Bumdes, masing-masing parameter memiliki pembobotan yang berbeda. Dalam hal ini, aspek usaha memiliki pembobotan paling tinggi yaitu 25%, kemudian diikuti oleh tatakelola kelembagaan dan dampak Bumdes kepada masyarakat yang keduanya memiliki bobot 20%. Parameter selanjutnya adalah terkait permodalan 15%, aturan 10% dan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan bobot 10%.

Data di atas juga menunjukkan bahwasanya Desa Mororejo umumnya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusianya, hal tersebut ditunjukkan oleh angka indeks ketahanan sosial yang memiliki score cukup tinggi yaitu 0,9257. Salah satu indikator dari ketahanan sosial sendiri yaitu partisipasi masyarakat. Menurut Bahransyaf (2013) indikator ketahanan sosial masyarakat yaitu: perlindungan sosial kelompok rentan; peningkatan partisipasi masyarakat; pengelolaan konflik sosial/tindak kekerasan di tingkat lokal; dan pemeliharaan kearifan lokal.

Sebelum adanya BUMDes Moroberkah, pengelolaan wisata, petugas sampah, dan persewaan lapangan dikuasai oleh swasta (perorangan), dimana seringkali terjadi permasalahan yang menimbulkan kesalahpahaman oleh beberapa pihak. Ketidakjelasan anggaran, pengelolaan yang buruk, serta manfaat yang hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja, mendorong Pemerintah Desa Mororejo untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sejak didirikannya BUMDes pada 2019 lalu, peneliti melihat banyak perubahan yang terjadi terutama dalam hal tata kelola wisata Pantai Ngebum, sehingga tidak butuh waktu lama bagi BUMDes Moroberkah untuk menjadi BUMDes dengan klasifikasi maju. Dalam hal ini, peneliti melihat partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan dari pengembangan BUMDes Moroberkah ini.

Berdasarkan pengalaman peneliti, dalam menjalankan BUMDes seringkali terdapat konflik baik dari internal maupun eksternal, seperti BUMDes tempat peneliti tinggal, yaitu di Desa Sidomakmur, karena tidak adanya dukungan dari masyarakat sehingga menyebabkan BUMDes tersebut harus vakum, dan banyak desa lain yang mengalami hal serupa. Melihat urgensi keberadaan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan BUMDes, Maka dari itu peneliti ingin menggali lebih dalam tentang BUMDES Moro Berkah dan peran aktif masyarakat Desa Mororejo di dalam mengembangkan BUMDES Moro Berkah ini. Guna untuk menggali lebih dalam terkait hal tersebut, Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes Moro Berkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Bumdes Moro Berkah?
- b. Mengapa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Bumdes Moro Berkah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Bumdes Moro Berkah.
- b. Untuk mengetahui mengapa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Bumdes Moro Berkah.\

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa melalui BUMDes.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 2 bagian yakni :

1. Partisipasi Masyarakat

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya Muh Firyal Akbar dkk (2018), Siti Hidayati (2019), Herman (2019), Mohammad Mulyadi (2020), dan Kadek Cahya Susila Wibawa (2019).

Penelitian Akbar (2018) "*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam, eksplisit, dan subjektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi anggota masyarakat sebagai satu kesatuan sistem, sebagai individu yang menjadi bagian dari itu sangat penting dan sangat penting dalam proses perkembangan yang dinamis, karena prinsip pembangunan menunjukkan bahwa mereka membentuk masyarakat makmur. Oleh karena itu tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pembangunan tidak hanya di tangan pemerintah, namun juga di tangan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan,

dalam hal ini ikut serta menentukan tujuan pembangunan melalui kebijakan pemerintah.

Kajian Hidayati (2019) “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di definisikan sebagai partisipasi aktif masyarakat secara individu dan kelompok dalam menegakkan ketertiban umum, atau hukum dan peraturan, melalui penentuan kebijakan publik atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulis juga menjelaskan bahwa penerapan asas peran masyarakat bertujuan untuk; Pertama, prinsip ketelitian dan kehati-hatian diperkenankan oleh pegawai negeri sipil dalam perumusan kebijakan publik. Kedua, munculnya kontrol sosial mempersiapkan masyarakat yang konstruktif dan sosial untuk segala bentuk kegiatan pembangunan yang mempengaruhi.

Kajian Herman (2019) “*Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*”. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai alat yang digunakan untuk mencari dan menemukan data-data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwasanya dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari 4 hal yakni : 1). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Desa Ulidang menggunakan pendekatan partisipatif dalam merumuskan setiap kebijakan desa. 2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya dalam hal perencanaan, masyarakat Desa Ulidang juga ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. 3). Partisipasi masyarakat dalam bentuk kemanfaatan Desa Ulidang, dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa Ulidang, secara tidak langsung hal tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Ulidang juga ditujukan untuk masyarakat Desa Ulidang itu sendiri. 4.) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan. Selain itu masyarakat Desa Ulidang juga ikut serta dalam proses evaluasi pembangunan Desa Ulidang. Yang mana dalam hal ini Pemerintah Desa Ulidang mengundang masyarakat guna untuk mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ulidang melalui musyawarah desa.

Kajian Mulyadi (2020) "*Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19*". Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam penanganan virus *covid 19* di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk menyebarkan penyebaran virus *covid 19* ini. Dikarenakan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, maka pencegahan dan penanganan virus *covid 19* ini tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa usaha penanganan penyebaran virus *covid 19* ini harus senantiasa melibatkan masyarakat di dalamnya. Hal tersebut sudah tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyebutkan bahwa, masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan wabah penyakit menular dengan mentaati aturan untuk tetap melakukan aktivitas di dalam rumah, menjaga jarak dengan orang lain, serta aktif dalam upaya pencegahan wabah penyakit menular dilingkungan masing-masing. Namun penulis juga menuturkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang sadar akan hal tersebut sehingga upaya pencegahan dan penanganan virus *covid 19* ini tidak berjalan dengan maksimal.

Penelitian Wibawa (2019) "*Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*". Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi cara untuk mempromosikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kehidupan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan

situasional. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Sehingga masyarakat harus ikut mengawal dan mengawasi setiap keputusan pemerintah tentang lingkungan hidup apabila menyimpang dari UU PPLH atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa kajian di atas terkait dengan partisipasi masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam menentukan kebijakan pembangunan pemerintah. Selain itu sejalan dengan penelitian ini, kajian di atas juga menyebutkan bahwa masyarakat harus senantiasa ikut serta dalam penentuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, dan juga ikut serta dalam evaluasi agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan dari adanya peraturan tersebut.

2. BUMDES

Studi tentang BUMDES telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Untuk mengetahui bagaimana BUMDES berperan dalam membangun sebuah desa, penulis akan menunjukkan beberapa kajian terkait permasalahan tersebut diantaranya kajian Widiastutia (2019), Endah (2018), Darwita (2018), Nurhasan (2020), dan Sumiasih (2018) :

Kajian Widiastutia (2019) “*Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*”. Ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, *focus group discussion* dan *survey*. *Focus group* dihadiri oleh BUMDes Amarta (Sleman), Srimartani (Bantul) dan BUMDes Dlingo Giritama (Bantul). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes terbagi menjadi 5 kategori yaitu rintisan, tumbuh, matang, maju, dan besar Suryanto (2018). BUMDes dengan pendapatan tahunan 0 hingga 360 juta, dengan staf dari 0 hingga 30 orang, donasi PADES dari 0 hingga 30 juta dan dukungan sosial dari 0 hingga 3 juta diklasifikasikan sebagai BUMDes rintisan. Ketiga BUMDes tersebut telah

menjalankan usaha sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh desanya sendiri. Misalnya BUMDes Amarta yang memilih menjalankan unit usaha pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan masyarakat terkait dengan sampah. Dengan mengubah sampah menjadi pupuk, BUMDes amarta menerima keuntungan finansial sekaligus menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Peran BUMDes sejalan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat yang berusaha mencapai misi sosialnya dengan tetap menjalankan bisnis sesuai mekanisme pasar Santos (2012).

Selanjutnya kajian Endah (2018) “*Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”. Kemandirian desa pada dasarnya merupakan kemampuan desa baik masyarakat maupun pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi tersebut bisa berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu penelusuran literatur atau telaah berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat menopang perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang tersedia di sana. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berperan dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial lokal serta mengkoordinir dan merawat kelompok marginal agar masyarakat lebih kreatif dan berdaya guna.

Sedikitnya terdapat 6 (enam) prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa menurut Purnomo (2016:9) yaitu :

1. Kooperatif: Seluruh usaha yang terdapat di dalam BUMDes harus senantiasa didukung oleh kerjasama yang solid oleh seluruh komponen yang ada di dalam BUMDes agar pengembangan usaha berjalan dengan baik.
2. Partisipatif: Seluruh komponen di dalam BUMDes harus terlibat secara sukarela dalam memberikan kontribusi ataupun dukungan demi kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3. Emansipatif: Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku maupun agama.
4. Transparan: Semua kegiatan kepentingan umum harus terbuka dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
5. Akuntabilitas: Semua kegiatan BUMDes harus bertanggung jawab secara teknis dan administratif.
6. Sustainable: Semua kegiatan usaha harus dikembangkan dan dipelihara secara kreatif dan efisien oleh masyarakat melalui BUMDes

Selanjutnya kajian Darwita (2018) "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa dengan adanya BUMDes Desa Tejakula, dan untuk mengetahui bagaimana peran bumdes dalam menaggulangi pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif guna untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang perencanaan pembangunan Desa Tejakula melalui BUMDes Tejakula. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Tejakula dalam perencanaan pembangunan oleh BUMDes adalah sebagai Stabilisator, Innovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana. Peran pemerintah sebagai stabilisator yaitu ditunjukkan dengan usaha pemerintah desa dalam upaya menyelesaikan permasalahan di BUMDesa Tejakula, peran sebagai inovator yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada BUMDes untuk melaksanakan progam desa yang berikaitan dengan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula, peran pemerintah sebagai modernisator yaitu peran pemerintah dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia di BUMDes Tejakula, sedangkan peran sebagai pelopor dan pelaksana yaitu bagaimana Pemerintah Desa Tejakula berkomitman untuk menggaulangi meningkatnya angka pengangguran di Desa Tejakula melalui BUMDes Tejakula.

Selanjutnya kajian Nurhasan (2020) “*Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu*”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang meneliti tentang fenomena sosial secara aktual. Teknik pengumpulan data penelitian ini berasal dari *survey literature* dan pengalaman, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan sistematis dan akurat. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dan bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes pada dasarnya sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes mampu mengurangi angka pengangguran di desa. Beberapa usaha dari BUMDes Desa Panjalu yang memberikan pemasukan besar untuk desa antara lain pengelolaan sampah dan parkir, adanya pasar wisata Desa Panjalu tentunya memiliki potensi sebagai pusat perekonomian di Desa Panjalu, unit pengelolaan sampah di Pasar Desa Panjalu memberikan sekitar 300 ribu dalam sehari dan unit parkirnya memberikan sekitar 500 ribu perhari, hal tersebut tentunya selain menjadi pemasukan bagi kas desa namun juga mampu untuk memberikan pekerjaan untuk masyarakat desa itu sendiri Kemudian adanya unit simpan pinjam, unit usaha sektor riil, dan unit usaha rumah tangga yang dikelola oleh bumdes dengan bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Selanjutnya kajian Sumiasih (2018) *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata “Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung”*. Kajian ini merupakan kajian empiris, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, serta menggunakan data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan desa. Hasil survey ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Desa Pakse Provinsi Bali sepenuhnya dikelola oleh BUMDesnya. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Pakse Bali antara lain adalah Unit Usaha Pemurnian Air, Unit

Usaha Pengelolaan Sampah, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Pasar dan Unit Usaha Pariwisata. Keunggulan dari BUMDes Pakse Bali adalah dari sektor wisatanya, dimana pendapatan rata-rata perbulan bisa mencapai 15-20 juta hanya dari sektor pariwisatanya saja, sedangkan apabila penghasilan seluruh sektor digabungkan bisa mencapai sekitar 100 juta pertahun. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes tersebut dialokasikan untuk modal BUMDes itu sendiri dan juga untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat, ataupun pendidikan, kesehatan serta kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu dalam rangka memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), BUMDes Pakse Bali sering menggelar pelatihan teruntuk masyarakat yang mempunyai kererbatasan dalam pengetahuan untuk mampu mengembangkan pariwisata Desa Pakse Bali dengan lebih inovatif.

Berdasarkan beberapa studi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan atau manajemen yang baik dari pengurus BUMDes menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan dari BUMDes itu sendiri, tanpa melihat bagaimana peran masyarakat di dalamnya. Maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat di dalam pengembangan sebuah Badan Usaha Milik Desa di Desa Mororejo.

F. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Kualitatif menurut Basrowi (2008) merupakan penelitian terhadap objek yang tidak dapat diteliti secara statistik ataupun kuantifikasi. Data yang dihasilkan penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan kemampuan indra manusia berupa penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Sehingga data dihasilkan oleh penelitian kualitatif berbentuk bahasa, deskripsi, dan perilaku individu yang diamati. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mempelajari peristiwa sosial, fenomena mental dan proses tanda, berdasarkan pendekatan non-positivis Dimiyati (1990). Ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan lingkungan alam untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, dan

menggabungkan berbagai metode yang ada Denzim dan Lincoln (1994) dalam Anggito (2018).

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, suatu peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, serta pemikiran manusia baik sebagai individu maupun kelompok, maka dari itu penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, sehingga mampu menghasilkan data berupa fakta-fakta/kenyataan melalui proses berpikir induktif. Artinya penelitian kualitatif tidak membatasi suatu permasalahan dengan sebuah pilihan jawaban, akan tetapi membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi kepada objek penelitian melalui data-data yang dihasilkan dari ucapan, tulisan, atau perilaku informan melalui observasi, wawancara, ataupun pengamatan langsung oleh peneliti, guna untuk mengetahui masalah tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu sebuah pendekatan penelitian yang mempelajari fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang telah terjadi dalam waktu tertentu. Studi kasus tersebut diarahkan untuk mengkaji mengenai hambatan, kesulitan, maupun perwujudan kasus bukan berasal dari konteks yang dipaparkan tersebut melainkan karena adanya suatu keunggulan atau keberhasilan. Studi kasus diarahkan pada mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-faktor yang penting yang terkait dan menunjang kondisi dan perkembangan tersebut.

G. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang berasal dari observasi, berperan langsung, ataupun wawancara secara mendalam dengan informan yang paham dengan permasalahan yang sedang diteliti. Chaterine Marshall dan Gretchen B. Rossman (1995) dikutip oleh Sugiyono (2007), menyatakan bahwa metode mendasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, partisipasi dalam latar, pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Mororejo, Perangkat Desa Mororejo, Ketua BUMDes Moroberkah, anggota BUMDes Moroberkah, dan Warga masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang mana sumber data ini biasanya digunakan untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh secara langsung (sumber data primer). Diantara sumber data sekunder dokumen pendukung, catatan terdahulu, buku, jurnal, dokumentasi, dan dokumen lainnya untuk memperkuat argumentasi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan metode yang sangat tepat untuk mengamati subjek penelitian seperti perilaku dalam ruang, waktu, dan situasi tertentu Mantra, (2008). Tetapi tidak semua perilaku subjek penelitian diamati, kecuali perilaku yang relevan dan mencakup ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan observasi guna untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Lebih lanjut dikatakan bahwa cara yang dilakukan oleh pakar metodologi kualitatif dalam mengamati perasaan, persepsi, dan pengetahuan orang-orang yaitu dengan wawancara mendalam dan intensif Queen (1980)

c. Dokumentasi

Sugiyono (2007) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen beragam jenis diantaranya tulisan, gambar, maupun karya-karya bersejarah dari suatu tokoh atau objek. Tahapan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan mencatat data-data yang telah diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada penelitian ini bersifat induktif, yakni hasil analisa berlandaskan data yang dicapai, dan diperluas menjadi suatu hipotesis, memperoleh data secara kontinue, hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dicapai. Teknik analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang akan terjadi secara bersamaan. Tiga kegiatan tersebut diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mengarahkan, menghapus yang tidak penting, dan menyusun data dengan versi sedemikian rupa sehingga akhir kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan. Dalam reduksi ini mendapati dua jenis proses yakni *living in* dan *living out*. *living in* disebut

dengan data yang terpakai atau digunakan sedangkan *living out* dikenal dengan data yang tidak terpakai atau tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Penyajian dianggap sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data didapati dalam konteks uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan menunjukkan data, selanjutnya dapat melancarkan dalam mempelajari apa yang terjadi, merencanakan proses setelahnya berdasar atas sesuatu hal yang sudah dipelajari.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan inti dari cakupan penelitian yang mengilustrasikan gambaran tinjauan akhir penelitian berlandaskan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang disusun wajib signifikan sesuai fokus penelitian, tujuan penelitian serta cakupan penelitian yang telah diinterpretasi dalam ulasan analisis penelitian. Kesimpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari perkara penelitian yang dipecahkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi mempermudah dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup kedalam enam bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini mengidentifikasi intens terkait teori Partisipasi Pembangunan JM. Cohen, NT, dan Uphoff digunakan dalam mengkaji problematika yang akan diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan secara umum objek pada penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup : kondisi geografis, demografi, gambaran umum lokasi penelitian, profil lembaga BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO KECAMATAN KALIWUNGU

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

BAB V ALASAN MASYARAKAT IKUT SERTA DALAM MENGEMBANGKAN BUMDES DAN DAMPAK DARI ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN BUMDES MORO BERKAH

Bab ini menjabarkan detail valid invensi data penelitian perwujudan dari teori Goldsmith dan Blustain tentang alasan masyarakat ikut serta dalam mengembangkan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari perkara penelitian yang dipecahkan. Saran sebagai solusi pandangan peneliti terhadap berbagai pihak, lembaga, pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mencantumkan daftar referensi pendukung dalam penyusunan penelitian.

BAB II

TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan pengambilan bagian dalam kegiatan bersama Bhattacharyya (1972). Salah satu tolak ukur terwujudnya *Good Governance* adalah adanya keterlibatan masyarakat. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nasution (2009), bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam suatu perencanaan kebijakan pembangunan. Setidaknya dengan melibatkan masyarakat di dalamnya, kebijakan yang dirumuskan lebih berkualitas dan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan daerah dapat disebut juga dengan partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1995) dalam Sahid (2011) merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Sedangkan Herbert MC Clasky dalam Gatara (2007) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas sukarela warga negara melalui partisipasi langsung atau tidak langsung dalam proses pemungutan suara untuk kekuasaan dan dalam perumusan dan penetapan kebijakan.

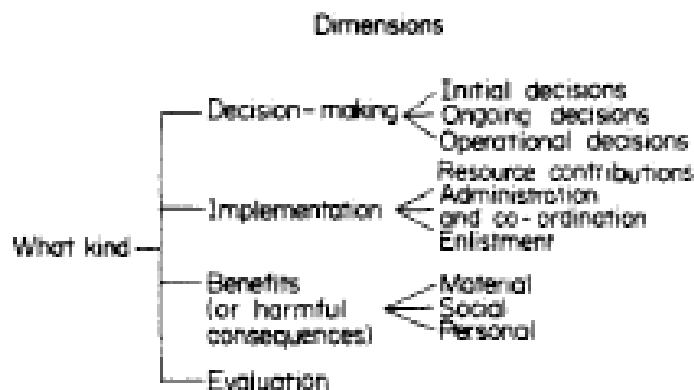
Menurut Cleaver (2002) dalam Cooke (2002) mengatakan bahwa partisipasi juga memiliki makna yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Terdapat tiga makna partisipasi dalam konsep ini. Pertama bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan meningkatkan efisiensi atau dengan mengkampanyekan aspek-aspek demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Kedua, Pemaknaan partisipasi dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu instrumen atau *means* dan tujuan atau *ends*. Ketiga, sering disebut dengan *elite capture* yaitu partisipasi dengan melibatkan beberapa aktor yang memiliki peranya masing masing. Aktor aktor tersebut bisa meliputi tokoh masyarakat, pejabat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

Cleaver memperjelas bahwa partisipasi merupakan sebuah alat. Alat yang dimaksud disini yaitu alat untuk memenuhi tujuan dari perencanaan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi memberikan sumbangsih positif dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, sehingga masyarakat mampu untuk mengetahui isi dari keputusan tersebut dan mengetahui manfaat dari dijalankannya keputusan tersebut. Definisi di atas juga didukung oleh Mikkelsen (2011) ia memperkenalkan konsep pembangunan parsipatoris sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan parsipatoris merupakan proses perencanaan pembangunan yang di dalamnya melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran akan sistem kehidupannya sendiri. Keterlibatan tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, keterampilan, dan sarana prasarana.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap sistem hidupnya dalam perencanaan pembangunan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sarana prasarana.

(Cohen, 1980) dalam tulisanya menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4 Teori Cohen Uphoff



Sumber : (Cohen, 1980)

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in Decision making*). Partisipasi ini menuntut masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Di sini masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dan memberikan saran untuk pembentukan program dan politik. Masyarakat berpartisipasi dalam mendiskusikan masalah, mencari solusi alternatif, dan mendiskusikan keputusan. Sifat dari partisipasi ini dapat bersifat penasehat atau kemitraan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dilihat dari :

1) Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan.

Keterlibatan masyarakat dalam rapat perencanaan menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena masyarakatlah yang akan menerima dampak secara langsung dari adanya sebuah kebijakan. Oleh karenanya, masyarakat harus senantiasa terlibat dalam rapat perencanaan pembangunan desa guna untuk memberikan aspirasi-aspirasinya terhadap rencana pembangunan desa.

2) Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap rapat/pertemuan.

Partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan kebijakan tidak tanpa didasari oleh suatu hal. Masyarakat dihadirkan di rapat tersebut agar bisa menyampaikan masukan, saran, kritik, dan pemikirannya terhadap rencana pembangunan desa kedepan. Oleh karenanya pemerintah desa harus menyadari suatu hal bahwa masyarakat bukan hanya sekedar objek pembangunan namun juga sebagai subjek dari adanya pembangunan itu sendiri.

3) Memberikan data/informasi dalam pertemuan rapat

Masyarakat merupakan sumber informasi. Data-data/informasi dari masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah desa dalam mencetuskan sebuah kebijakan. Kemampuan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah desa biasanya dipengaruhi oleh *disclousure* dan diseminasi informasi kepada

masyarakat. Masyarakat akan cenderung memberikan informasi apabila pemerintah desa juga menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, yang meliputi dokumen publik seperti ; Peraturan Daerah, Dokumen perencanaan, anggaran, sumber daya alam, dan aset. Keterbukaan akses informasi kepada masyarakat mendorong masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat menunjang pembangunan. Oleh karenanya pemerintah desa harus memberikan akses informasi selebar-lebarnya kepada masyarakat.

4) Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan keputusan

Partisipasi masyarakat di dalam pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah hal yang vital dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karenanya masyarakat tidak hanya sekedar dilibatkan dalam proses perencanaannya saja, namun juga terlibat langsung di dalam proses perumusan kebijakan. Seringkali pemerintah desa menganggap partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hanya sebatas formalitas saja, dan yang akan menentukan kebijakan tetap dari pemerintah desa itu sendiri.

b. Partisipasi Pelaksanaan (*Participation in Implementation*) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. ia memiliki tiga bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Cohen (1977) terdapat tiga bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yaitu :

- 1) Kontribusi berupa tenaga. Umumnya bentuk kontribusi ini mengandalkan kemampuan fisik seperti gotong royong, perbaikan fasilitas umum, dan keterlibatan dalam proses pembangunan lainnya.. Upaya ini mampu membuat proses pembangunan lebih efektif dan efisien.
- 2) Kontribusi berupa uang. Bentuk kontribusi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kendala untuk berkontribusi secara langsung dan memilih untuk memberikan bantuan berupa uang

untuk menunjang proses pembangunan. Bentuk kontribusi ini tentunya sangat membantu dalam pembangunan namun juga terdapat kendala di dalamnya, yaitu kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas sehingga jumlah kontribusi yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

- 3) Kontribusi berupa material. Kontribusi bentuk material disini berupa bahan material yang digunakan dalam proses pembangunan, sehingga sama seperti sebelumnya, kontribusi ini menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat sendiri. Namun kontribusi jenis ini juga sangat berdampak baik dalam pembangunan.
- c. Partisipasi dalam kemanfaatan (*participation in benefit*), Bentuk partisipasi ini bersifat lebih mendidik karena masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang lebih membawa manfaat positif bagi pemerintah dan masyarakat antara lain berpartisipasi dalam kegiatan untuk menjaga keamanan lingkungan. partisipasi dalam kegiatan organisasi ekonomi).
 - d. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*), Masyarakat terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hasil rencana pembangunan. Masyarakat bisa memberikan saran atau kritik. Untuk membantu mengatasi kekurangan atau hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pendapat Cohen dan Uphoff terhadap partisipasi masyarakat, dapat dipahami bahwa empat partisipasi di atas dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan sejauh apa peran yang diambil untuk turut terlibat pada sebuah program. Keempat jenis tahapan partisipasi ini jika dilakukan bersama akan membentuk semacam siklus kegiatan pembangunan dengan memusatkan perhatian serta cara-cara dimana partisipasi sehingga dapat menjelaskan dan mengindikasikan kualitas partisipasi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Goldsmith dan Blustain dalam Ndraha (1990) berdasarkan hasil penelitian mereka di Jamaika, Umumnya masyarakat akan senantiasa berpartisipasi apabila :

- a. Partisipasi adalah melalui organisasi yang dikenal atau sudah ada di komunitas masing-masing.
- b. Partisipasi ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terkena dampak.
- c. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi dapat melayani kepentingan masyarakat setempat.
- d. Proses partisipatif menjamin kontrol masyarakat. Ia menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lebih rendah ketika masyarakat tidak mengetahui atau memiliki peran yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan.

Menurut Santoso Sastropetro (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan yaitu:

- a. Kesadaran dan motivasi bukanlah faktor yang muncul begitu saja, tetapi muncul karena adanya dorongan untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri.
- b. Partisipasi dalam suatu komunitas biasanya karena adanya kekompakan yang kuat dalam komunitas tersebut. Dan itu dimulai dari pemimpinnya. Partisipasi mereka dengan demikian bukan karena kesadaran mereka sendiri, melainkan ekspresi solidaritas yang sudah menjadi kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya di pedesaan.
- c. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki peran sebagai perumus kewajiban konstruksi publik Masyarakat akan merasa diayomi ketika pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka. Dukungan tokoh masyarakat juga sangat menentukan partisipasi masyarakat, diharapkan mereka dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keterlibatan tokoh masyarakat membantu untuk mengawasi dan membimbing mereka yang tidak tahu tentang pembangunan desa dan bagaimana memainkan peran kontrol sosial dalam masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUN BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO

A. Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

1. Profil Desa Mororejo

Mororejo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Wilayah Kaliwungu, Pemerintahan Wilayah Tingkat II Kendal. Saat ini (2018) Desa Mororejo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Mustofa Kamal. Desa Mororejo merupakan wilayah pesisir dengan ketinggian kira-kira satu meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata berkisar antara 25-30 derajat Celcius, sedangkan curah hujan berkisar antara 1000 hingga 2000 milimeter per tahun.

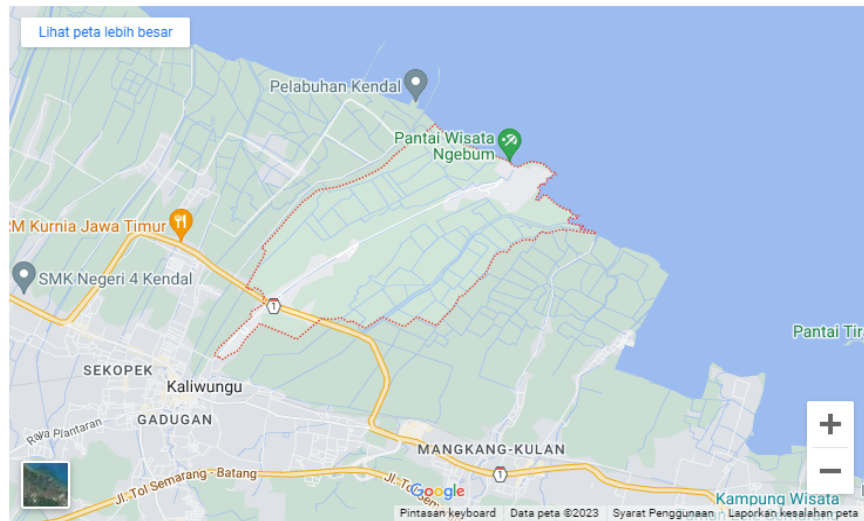
Batas kota Mororejo meliputi ; Utara (Samudera Jawa/Laut Jawa), Timur (wilayah semarang), Sisi selatan (Desa Kutoharjo), Bara (Desa Wonorejo). Luas wilayah Desa Mororejo adalah 1.435.095 Ha, terbagi menjadi 7 (tujuh) vila, 8 (delapan) RW dan 37 (tiga puluh tujuh) RT. Salah satu ciri khas yang ada di Desa Mororejo adalah Garis Pantai Ngebum yang menjulang dari timur ke barat.

Berdasarkan gambar di atas. Dapat dilihat bahwa Desa Mororejo terletak di ujung utara Kabupaten Kendal, dikarenakan lokasinya yang berbatasan langsung dengan laut jawa, dan berseberangan dengan Pulau Kalimantan, hal tersebut membuat wilayah Mororejo memiliki banyak potensi dalam bidang kelautan dan pariwisata.

Berikut ini peta Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu :

Gambar 3.5

Peta Wilayah Desa Mororejo



Sumber : (BPS KENDAL, 2019)

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Mororejo terikutip dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Mororejo Tahun 2019

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	0 - 4	236	3,25	240	3,30	476	6,55
2	5 - 9	309	4,25	270	3,71	579	7,96
3	10 - 14	312	4,29	310	4,26	622	8,56
4	15 - 19	233	3,20	234	3,22	467	6,42
5	20 - 24	287	3,95	283	3,89	570	7,84
6	25 - 29	322	4,43	304	4,18	626	8,61
7	30 - 34	327	4,50	276	3,80	603	8,29
8	35 - 39	315	4,33	297	4,09	612	8,42
9	40 - 44	281	3,87	287	3,95	568	7,81
10	45 - 49	250	3,44	259	3,56	509	7,00
11	50 - 54	231	3,18	254	3,49	485	6,67
12	55 - 59	225	3,09	233	3,20	458	6,30
13	60 - 64	164	2,26	157	2,16	321	4,42
14	65 - 69	83	1,14	78	1,07	161	2,21
15	70 - 74	45	0,62	64	0,88	109	1,50
16	>= 75	37	0,51	67	0,92	104	1,43
JUMLAH		3.657	50,30	3.613	49,70	7.270	100,00

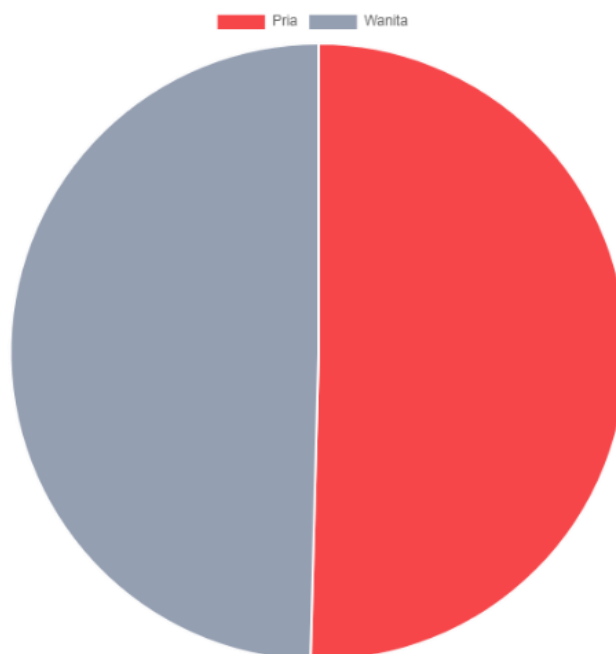
Sumber : (BPS KENDAL, 2019)

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk Desa Mororejo berdasarkan usia. Tabel tersebut memperlihatkan penduduk Desa Mororejo pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia 25-29 tahun dengan presentase 8,56%, kemudian penduduk usia 10-14 tahun dengan presentase 8,56%, dan penduduk usia 35-39 tahun dengan presentase 8,42%. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Desa Mororejo saat ini karena penduduk Desa Mororejo saat ini didominasi oleh usia produktif, usia dimana biasanya timbul pikiran-pikiran kreatif serta inovasi yang mampu mendorong perubahan desa menjadi lebih baik lagi, sehingga apabila pemerintah desa bisa memanfaatkan dengan baik potensi mereka dengan memberikan ruang untuk mereka mampu menyampaikan ide-idenya itu akan menjadi hal yang sangat baik.

Penduduk Desa Mororejo juga hampir seimbang antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Gambar 3.6

Diagram Jumlah penduduk Desa Mororejo Berdasarkan jenis kelamin



Sumber : (BPS KENDAL, 2019)

Diagram di atas menunjukkan selisih yang cukup sedikit antar penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 3.657 jiwa atau sekitar 50,30%, dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 3.613 dengan presentase 49,70%.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kepekaan dan kepedulian untuk ikut serta membangun daerahnya juga relatif tinggi. Berikut ini data jumlah penduduk Desa Mororejo berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Mororejo 2019

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.085	14,92	1.141	15,69	2.226	30,62
2	Belum Tamat SD/Sederajat	192	2,64	184	2,53	376	5,17
3	Tamat SD/Sederajat	820	11,28	968	13,31	1.788	24,59
4	SLTP/Sederajat	690	9,49	612	8,42	1.302	17,91
5	SLTA/Sederajat	740	10,18	557	7,66	1.297	17,84
6	Diploma I/II	1	0,01	8	0,11	9	0,12
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	22	0,30	50	0,69	72	0,99
8	Diploma IV/Strata I	102	1,40	92	1,27	194	2,67
9	Strata II	5	0,07	1	0,01	6	0,08
10	Strata III	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		3.657	50,30	3.613	49,70	7.270	100,00

Sumber ; (BPS KENDAL, 2019)

Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mororejo memiliki perhatian khusus dalam hal pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan S1 yaitu sebanyak 194 orang, SLTA/Sederajat 1.297 orang, dan SLTP/Sederajat sebanyak 1.302 Orang.

5. Struktur Pemerintah Desa Mororejo

Adapun struktur Pemerintah Desa Mororejo sebagai berikut :

Susunan organisasi Pemerintah Desa Mororejo:

- a) Kepala Desa : Mustofa Kamal
- b) Sekretaris Desa : Drs. Suyuti
- c) Kaur Umum : Nur Kholis
- d) Kaur Perencana : Iswoko
- e) Kaur Keuangan : Tawiyatul, S.Kep
- f) Staff I : Ardian, S.Kom
- g) Staff II : Fetty, Amd
- h) Kasi Sejahteraan : Turmudhi
- i) Kasi Pelayanan : Khumaedi
- j) Kasi Pemerintahan : Chariri
- k) Kadus I : M. Saefudin
- l) Kadus II : -
- m) Kadus III : M. Amir Ghoni

B. BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

1. Sejarah Berdirinya BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Pada akhir tahun 2018 Mororejo melakukan Jual Beli Bengkok dan Jual Tiket Masuk Garis Pantai Ngebum, namun pada awal tahun 2019 Pemenang lelang Tiket Masuk Pantai menyerah. Sambutan dari Camat Kaliwungu dan Tenaga Ahli Dispermasdes saat ada MUSDES Pengusulan penataan BUMDES di Desa Mororejo. Akhirnya dalam kegiatan MUSDES disepakati untuk membentuk BUMDes untuk melihat peluang-peluang yang ada di Kota Mororejo. Kemudian

munculah bukti-bukti yang dapat dikenali dari kelompok 9 yang diserahkan kembali melalui MUSDES dan disepakati untuk mendirikan BUMDES di Desa Mororejo, dan disepakati membawahi 3 Unit Perdagangan secara khusus : Administrasi Pariwisata, Administrasi Unit Sampah, Administrasi Lapangan Desa.

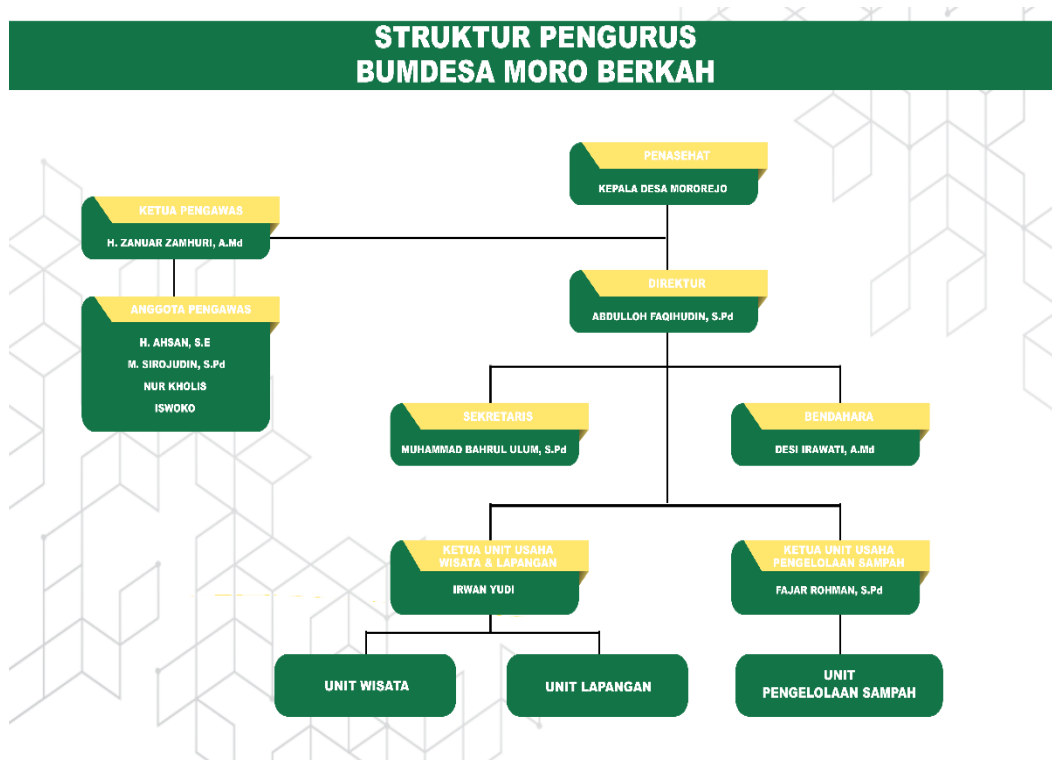
Adapun pemanfaatannya, BUMDES MORO BERKAH menjadikan AD/ART sebagai arahan dalam melaksanakan latihan dan membuat SOP mengenai penggunaan tenaga kerja sehingga tercipta iklim kerja yang baik.

2. Struktur pengurus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Struktur Pengurus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo saat ini terdiri dari 14 orang yang masing-masing mengisi posisi seperti yang tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 3.7

Struktur Pengurus BUMDes Moroberkah



Sumber : (BUMDES MOROBERKAH, 2023)

Tabel 3.4

Tabel Pengurus BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu

No	Nama	Jabatan
1.	Mustofa Kamal (Kepala Desa Mororejo)	Penanggung Jawab
2.	Abdullah Faqihudin	Direktur
3.	M. Bahrul Ulum	Sekretaris
4.	Desi Irawati	Bendahara
5.	Zanuar Jamhuri	Ketua Pengawas
6.	Iswoko	Wakil Ketua Pengawas
7.	Ahsan	Sekretaris Pengawas
8.	Nur Kholis	Anggota Pengawas
9.	M. Sirojudin	Anggota Pengawas

Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu

3. Visi dan Misi BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Dibentuknya BUMDes Moroberkah tentunya karena ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dibentuknya BUMDes Moroberkah tercantum dalam visi berikut ini :

a. Visi

“Mewujudkan kemandirian Desa melalui pembangunan ekonomi kemasyarakatan yang mengedepankan kearifan lokal Desa sesuai tata nilai budaya dan kelestarian lingkungan demi terwujudnya Desa

yang berdikari, mandiri dan sejahtera melalui kelembagaan BUMDes yang transparan, Akuntabel dan Profesional”

Dalam mencapai visi yang hendak diraih, BUMDes Moroberkah menetapkan beberapa langkah yang akan dijalankan yang tercantum di bawah ini :

b. Misi

- 1) Menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian Desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penciptaan lapangan kerja.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar memiliki nilai tambah secara ekonomi. Menjadi pelopor pembangunan ekonomi Desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun perekonomian Desa berdasarkan Prinsip-prinsip Bumdes.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian Desa.
- 5) Memberikan pelayanan terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga Masyarakat Desa.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi Desa dan berorientasi pada kearifan lokal.

4. Tugas dan Fungsi Pengurus BUMDes Moro Berkah

Dalam rangka menjalankan BUMDes Moroberkah agar berjalan secara sistematis, BUMDes Moroberkah membentuk susunan kepengurusan yang memiliki tugasnya masing-masing sebagai berikut :

- a. Penasehat:
 - 1) Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes Moro Berkah.
 - 2) Memberikan saran dan pendapat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan kepengurusan dan pengelolaan BUMDes Moro Berkah.
- b. Direktur:
 - 1) Memimpin, mengelola dan mengurus BUMDes Moro Berkah dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes Moro Berkah.
 - 2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) unitunit usaha BUMDes Moro Berkah.
 - 3) Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes Moro Berkah.
 - 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes Moro Berkah baik internal maupun eksternal.
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes Moro Berkah dengan persetujuan Kepala Desa.
 - 6) Mewakili BUMDes Moro Berkah di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Bertindak atas nama lembaga BUMDes Moro Berkah untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
 - 8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes Moro Berkah secara berkala kepada Kepala Desa dan Pengawas BUMDes Moro Berkah.
 - 9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes Moro Berkah akhir tahun kepada Kepala

Desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

c. Sekretaris:

- 1) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur BUMDes Moro Berkah.
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes Moro Berkah.
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes Moro Berkah.
- 4) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes Moro Berkah.
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes Moro Berkah.
- 6) Mengelola surat menyurat secara umum.
- 7) Melaksanakan kearsipan.
- 8) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes Moro Berkah.

d. Bendahara:

- 1) Melaksanakan tugas perbendaharaan dan fungsi keuangan untuk mendukung kegiatan Direktur dalam menjalankan dan mengelola BUMDes Moro Berkah.
- 2) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes Moro Berkah.
- 3) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang / jasa unit usaha BUMDes Moro Berkah.
- 4) Mengelola penerimaan keuangan unit usaha BUMDes Moro Berkah.
- 5) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes Moro Berkah.

- 6) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
- 7) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 8) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- 9) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

e. Pengawas:

- 1) Mengawasi semua kegiatan serta memberikan saran dan pendapat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes Moro Berkah.
- 2) Melakukan pengawasan manajemen kepada Pelaksana Operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes Moro Berkah.

5. Unit Usaha BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

BUMDes Moroberkah merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Mororejo untuk menggali dan mengolah potensi-potensi yang terdapat di Desa Mororejo. Dengan begitu BUMDes Moroberkah membentuk unit-unit usaha yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di Desa Mororejo. Unit-unit usaha tersebut antara lain :

a. Unit Usaha Pariwisata

Unit usaha pariwisata merupakan salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Moroberkah. Unit usaha ini fokus terhadap pengelolaan Pantai Ngebum yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi BUMDes Moroberkah. Unit usaha ini fokus mengoperasikan Pantai Ngebum dengan bekerja sama dengan masyarakat Desa Mororejo sebagai pelaku usaha Pantai Ngebum yang diatur di dalam AD/ART BUMDes Moroberkah. Hasil pengelolaan unit usaha ini meliputi parkir, tiket masuk, penyewaan lapak

pedagang Pantai Ngebum, kamar bilas, Penyewaan ATV, penyewaan tikar, dan penyewaan mini gazebo. Unit usaha ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan BUMDes dengan nominal hingga mencapai 100-300 juta perbulan.

Gambar 3.8

Pantai Ngebum



Sumber : Observasi

Dokumen di atas adalah foto Pantai Ngebum yang merupakan objek wisata yang dikelola sepenuhnya oleh BUMDes Moroberkah. Foto tersebut juga menunjukkan aktivitas warga yang berjualan disekitarnya, terdapat beberapa tenda-tenda warung yang sengaja dibangun oleh BUMDes Moroberkah agar masyarakat bisa berjualan disana.

b. Unit Usaha Sampah

BUMDes Moroberkah di dalam pelaksanaanya juga menjalankan unit usaha sampah. Unit usaha sampah ini sudah ada sejak kepengurusan BUMDes terdahulu. Dalam menjalankan unit usaha sampah ini, BUMDes mengandalkan partisipasi masyarakat sebagai donatur utama dalam menjalankan usaha ini.

Masyarakat Desa Mororejo diminta untuk memilah antara sampah organik dan non organik, kemudian diletakan dihalaman rumahnya masing-masing dan akan diambil oleh petugas pengambilan sampah setiap satu minggu sekali.

Unit usaha sampah ini menghendaki masyarakat untuk iuran senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbulan untuk nantinya uang tersebut dikumpulkan untuk menggaji petugas pengambil sampah dan sebagian masuk dalam kas BUMDes Moroberkah.

c. Unit Usaha Penyewaan Lapangan Desa

Unit usaha terakhir yang dikelola oleh BUMDes Moroberkah yaitu unit usaha penyewaan lapangan desa. Desa Mororejo memiliki lapangan desa berupa lapangan sepakbola, dan lapangan badminton. Lapangan badminton terletak di dalam komplek balaidesa, sedangkan lapangan sepakbola berada persis di belakang Balaidesa Mororejo.

Dalam menjalankan unit usaha tersebut, BUMDes Moroberkah mematok tarif untuk siapa saja yang ingin menggunakan lapangan tersebut. Untuk tim yang ingin menggunakan lapangan sepakbola dikenakan tarif Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk lapangan badminton dikenakan tarif senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

BAB 1V

PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO KECAMATAN KALIWUNGU

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dibagi menjadi 4 pembahasan yaitu ; partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

A. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in Decision making*) menurut (JM. Cohen, 1977) menuntut masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh desa baik dalam hal (pemanfaatan sumberdaya alam dan alokasi anggaran) tidak boleh ditetapkan sepihak oleh pemerintah desa dan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut supaya pemerintah desa tidak dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah sejauh ini sudah difasilitasi oleh penyelenggara BUMDes dengan dibukanya forum-forum diskusi atau musyawarah ataupun dengan cara yang lain. Dengan dibukanya forum-forum tersebut memungkinkan masyarakat untuk dapat memberikan saran, masukan, dan kritiknya terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes Moroberkah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini utamanya untuk mengambil sebuah alternatif di dalam sebuah kesepakatan dengan masyarakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

1. Partisipasi dalam menghadiri rapat

Partisipasi masyarakat Desa Mororejo dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh BUMDes bersama dengan Pemerintah Desa Mororejo sudah

cukup baik. Pemerintah Desa dan BUMDes sudah cukup baik dalam melibatkan masyarakat dalam setiap rapat guna untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Gambar 4.9

Rapat tahunan BUMDes Moroberkah bersama dengan lembaga desa dan masyarakat 1 Februari 2023



Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu

Gambar di atas merupakan dokumentasi pada saat musyawarah desa yang membahas laporan pertanggung jawaban BUMDes Moroberkah, dan perencanaan Program BUMDes Moroberkah tahun 2023. Kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh BUMDes ini juga melibatkan perwakilan dari masyarakat mulai dari RT, RW, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan masyarakat yang terlibat sebagai pelaku pelaksana program BUMDes Moroberkah. Rapat pada tanggal 1 Februari 2023 tersebut bertujuan untuk merumuskan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan oleh BUMDes Moroberkah kedepan. Dengan melibatkan unsur masyarakat yang hadir di rapat tersebut, masyarakat dapat menyampaikan

aspirasinya sebagai bahan pertimbangan bagi BUMDes Moroberkah dalam merancang program kerja.

Rapat di atas dihadiri oleh tokoh masyarakat dan segenap lembaga desa yang terlibat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo. Kehadiran masyarakat dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa kepedulian akan nasib desa kedepan. Dari total 50 undangan yang disebar, hanya 5 orang yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Kepala Desa Mororejo mengatakan :

“Nggih mas. kemarin awal tahun mengadakan rapat, guna membahas mengenai program kerja dari BUMDes, kira-kira apa saja usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes kita tahun ini dan juga laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes tahun kemarin. Ya Alhamdulillah saya juga bersyukur karena banyak dari tokoh masyarakat yang hadir walaupun beberapa tidak hadir mungkin karena kesibukannya, total 50 undangan yang kita sebar hanya 5 orang yang berhalangan untuk hadir. Tetapi setidaknya beberapa yang hadir pada saat itu dapat memberikan masukan dan kritiknya kepada kita selaku penyelenggara pemerintahan desa dan BUMDes, untuk kira-kira apa yang sekiranya perlu kita benahi lagi agar kedepannya berjalan dengan baik.” (wawancara pada Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes Moroberkah, yaitu Abdullah Faqihudin yang mengatakan :

“Saya cukup merasa senang, karena masih banyak masyarakat yang benar-benar menginginkan kemajuan untuk desanya sendiri, mulai dari perwakilan masyarakat, pemuda, para pedagang di wilayah wisata pantai ngebum, RT, RW, BPD, dan pemerintah Desa, Kalau gak salah Cuma 5 orang yang berhalangan untuk hadir. (wawancara pada Bapak Faqih 3 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mororejo bersama dengan BUMDes Moroberkah telah mengusahakan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan rapat, termasuk di dalam rapat LPJ dan perencanaan program kerja BUMDes tahun 2023 ini. Semua organ yang berada di Desa ikut terlibat dalam membahas rancangan program pengurus BUMDes untuk tahun anggaran 2023 ini. Mulai dari RW, yang juga mewakili RT yang berada di RW tersebut, kemudian Karang Taruna sebagai perwakilan pemuda, BPD, Tokoh agama, dan juga PKK sebagai perwakilan perempuan juga ikut terlibat di dalam rapat LPJ dan perencanaan program BUMDes Moroberkah tersebut.

Menurut Kepala Desa Mororejo Bapak Mustofa Kamal mengatakan :

“Perempuan harus dilibatkan dalam pengembangan BUMDes ini, karena mereka punya peran yang sangat penting yang diperlukan sangat diperlukan oleh BUMDes untuk menunjang unit usaha BUMDes agar bisa berjalan. Seperti di dalam unit usaha sampah dan wisata, peran ibu-ibu rumah tangga disini sangatlah penting dan sangat menentukan keberhasilan BUMDes kita” (Wawancara Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Supi’ah salah seorang perwakilan PKK mengungkapkan “

“Njih mas, Kalau ada rapat BUMDes itu ibu-ibu PKK selalu diikutkan. Itu setiap orang biasanya dikasih undangan kerumah masing-masing gitu, yaa kita selalu menyempatkan untuk datang ya mas, kalau lagi tidak ada urusan yang benar-benar bisa ditinggal kita selalu datang” (Wawancara Ibu Supi’ah 7 Agustus 2023).

Tabel 4.5

**Rekap Kehadiran Rapat MUSDES dan LPJ BUMDes Moroberkah 1
Februari 2023**

NO	Nama	Jumlah Kehadiran
1.	Perangkat Desa	5 Orang

2.	BUMDES	7 Orang
3.	Perwakilan RW	10 Orang
4.	Tokoh agama	1 Orang
5.	Karang Taruna	2 Orang
6.	PKK	5 Orang
7.	Masyarakat Pelaku Usaha Pantai Ngebum	15 Orang

Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan wawancara di atas, partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat BUMdes Moroberkah cukup baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya dari 50 undangan yang disebarkan, hanya 5 orang yang berhalangan hadir. Masyarakat di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung progam-progam BUMDes agar tetap berjalan. Kehadiran masyarakat di dalam rapat memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil keputusan yang akan dicapai.

Partisipasi perempuan juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo. Keterlibatan perempuan dianggap oleh Pengurus BUMDes dan Pemerintah desa sangatlah penting, karena mayoritas usaha yang dijalankan oleh BUMDes Moroberkah lebih membutuhkan tenaga kaum perempuan di dalamnya. Seperti di dalam unit usaha sampah, dimana disitu membutuhkan tenaga Ibu-Ibu rumah tangga untuk memilah sampah rumah tangga antara sampah organik dan anorganik, selain itu di dalam unit usaha pengelolaan Pantai Ngebum Peran Ibu-Ibu juga sangatlah dibutuhkan untuk berjualan dan menyediakan keperluan wisatawan disekitaran Pantai Ngebum, sehingga para wisatawan tidak bosan berkunjung ke Pantai Ngebum. Dengan begitu, perempuan harus selalu dilibatkan termasuk dalam proses pembuatan kebijakan, agar kebijakan yang kemudian dihasilkan tidak merugikan dan bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Partisipasi perempuan dalam rapat perencanaan kebijakan di atas diwakili oleh kelompok PKK yang terdiri dari 5 orang, selain itu juga terdapat beberapa pelaku usaha Pantai Ngebum yang juga adalah seorang perempuan. Itu

menunjukkan bahwa perempuan dalam perencanaan kebijakan BUMDes Moroberkah juga dilibatkan tanpa mendegradasikan hak-hak perempuan.

Gambar 4.10 Daftar Hadir apat Kerja BUMDes Moroberkah 1 Februari 2023

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023
 Acara : Musdes Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Moro Berkah 2022
 Tempat : Gedung PKK Desa Mororejo

NO	NAMA	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1	T. HOHIN	RW 6	1
2	Mur W	BUMDes	2
3	Sukman	BUMDes	3
4	Kaidat	PKK	4
5	Abdul Kall	Rw 05	5
6	Mutmainah	BUMDes	6
7	ADHA FAJAR	Tiketing	7
8	Go Dizon	Pelaksana	8
9	Dn Kai	BUMDes	9
10	Dea Kawati	BUMDes	10
11	Zulkholih	RPD	11
12	ROSI	BUMDes	12
13	Rahmat	BUMDes	13
14	MUNIR ALIHM	BUMDES	14
15	ABDUL ROCHIM	BUMDES	15
16	Tajmiyah	PD	16
17	M. Saiful	BUMDes	17
18	Khairani	PD	18
19	Kamut R	RPD	19
20	SAWA ARIFW	RW 8	20
21	Alham	Perenas	21
22	M. S. Ulun	BPD	22
23	Wahid	Perenas	23
24	Abel Kuyanku	BPD	24
25	Muhammad Jodi	BUMDes	25
26	Mahmudin	BPD	26
27	Sidiq	PD	27
28	Sidiq	Perenas	28
29	Fotier	BUMDes	29
30	ZEDUN	SAMPAN	30
31	M. Amalia	Sagisi	31
32	Fach	dan	32
33	Stuladi	dan	33

Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari setiap pertemuan yang diadakan. Karena baik atau tidaknya partisipasi akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang diciptakan. Apakah kebijakan tersebut mampu mewakili masyarakat banyak atau hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang saja. Gambar di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh BUMDes Moroberkah sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh daftar hadir pada saat rapat laporan pertanggungjawaban dan

perencanaan program BUMDes Moroberkah yang menunjukkan beberapa elemen masyarakat yang ikut andil di rapat tersebut, mulai dari pengurus BUMDes, perwakilan RW, Pendamping Desa, PKK, dan pelaku usaha pantai ngebum yang juga ikut serta pada rapat tersebut. Kehadiran beberapa tokoh di atas merepresentasikan aspirasi masyarakat Desa Mororejo secara umum, sehingga dengan adanya perwakilan masyarakat di atas dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Mororejo agar nantinya dapat menciptakan keputusan-keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam hal pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting yang mampu menunjang pembangunan desa. Karena hal tersebut berkaitan dengan kesadaran dan rasa kepedulian masyarakat guna meningkatkan mutu hidup mereka sendiri. Artinya, masyarakat Desa Mororejo sadar bahwa pembangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa adanya tujuan, tapi merupakan suatu hal yang dapat membantu mempermudah kehidupan mereka sehari-hari.

Kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan BUMDes sangatlah penting untuk menyampaikan aspirasi mereka agar dapat diakomodasi oleh pemerintah desa ataupun BUMDes. Seperti yang disampaikan oleh Thohirin selaku ketua RW 05 bahwa :

“Iya mas, masyarakat harus dan wajib dilibatkan ketika ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Saya pribadi selalu menyampaikan apa yang diinginkan oleh warga saya di rapat seperti itu, terutama kalau ada pembangunan-pembangunan semacam itu..”(Wawancara pada Bapak Thohirin 3 Agustus 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus senantiasa diikutsertakan dalam rapat untuk pembangunan desa. Tujuan daripada adanya keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua RW, sebagai upaya penyerapan aspirasi dari masyarakat, guna sebagai bahan pertimbangan penyelenggara pemerintahan dalam merumuskan kebijakan. Hal serupa juga

disampaikan oleh Muhadi selaku perwakilan pedagang Pantai Ngebum, yang mengatakan bahwa :

“Saya dan temen-temen yang berdagang disekitaran pantai ngebum selalu hadir mas kalau ada undangan dari BUMDes, Jadi enak kita usul apapun yang kita butuhkan untuk kepentingan bersama, dan alhamdulillah juga selalu direspon baik oleh pengurus BUMDes Moroberkah mas”.
(wawancara pada Bapak Muhadi 7 Agustus 2023).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan sejauh ini sudah dilaksanakan oleh BUMDes Moroberkah, masyarakat senantiasa dilibatkan sehingga dapat memberikan usulan kepada BUMDes, sehingga BUMDes mampu untuk menyusun program kedepan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Moroberkah rutin menggelar rapat triwulan yaitu rapat yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Hal tersebut penting dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program BUMDes selama 3 bulan terakhir. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Faqihudin yang mengatakan :

“Kita juga rutin mengadakan rapat triwulan mas, sama seperti rapat-rapat yang lain, di dalam rapat triwulan kita juga melibatkan masyarakat dan pelaku usaha yang dikelola oleh BUMDes Moroberkah. Kenapa kita adakan rapat triwulan karena kita gatau mas, kadang saat kita menjalankan program kerja ada saja masalah yang timbul, maka dari itu kita adakan rapat triwulan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui jalan musyawarah.”
(Wawancara M.Faqihudin 3 Agustus 2023).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan keterangan Kepala Desa Mororejo Bapak Mustofa Kamal yang mengatakan :

Yaa untuk mengatasi masalah-masalah dilapangan biasanya BUMDes juga selalu musyawarahkan dengan masyarakat di rapat triwulan setiap 3 bulan

sekali. Itu sudah cukup bagus” (Wawancara Mustofa Kamal 3 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas menjelaskan Partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat BUMDes sudah cukup baik. Setiap perwakilan dari kelompok masyarakat memastikan aspirasi kelompoknya telah tersalurkan dengan baik kepada pemerintah desa maupun BUMDes. Pemerintah desa dan BUMDes juga senantiasa melibatkan kelompok perempuan di dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi perempuan menjadi salah satu tolak ukur baik atau buruknya partisipasi masyarakat dalam sebuah daerah. Partisipasi perempuan yang diwakili oleh PKK di dalam rapat BUMDes cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik BUMDes maupun Pemerintah Desa Mororejo menghendaki agar seluruh kepentingan kelompok masyarakat Desa Mororejo bisa tersalurkan kepada pemerintah Desa maupun kepada BUMDes, agar keputusan yang muncul di dalam rapat tersebut bisa berdampak baik kepada seluruh masyarakat utamanya untuk pengembangan BUMDes Moroberkah.

2. Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat

Keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan merupakan *issue* sentral, sehingga pemerintah harus memberikan ruang untuk proses dialektika bisa dilakukan. Kesiediaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat/saran dalam rapat yang diadakan oleh BUMDes Moroberkah masih kurang. Keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya maksimal, karena hanya sedikit dari perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kelompoknya. Hal tersebut di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Mororejo yang mengatakan :

“Sayangnya dalam rapat LPJ dan perancangan progam BUMDes seperti itu masih banyak masyarakat yang enggan untuk menyampaikan aspirasinya mas, dari beberapa yang hadir paling hanya satu dua saja yang berani bicara, ya kya pak RW, terus ketua karang taruna, yang lain kebanyakan hanya mengikuti saja” (Wawancara Bapak Suyuti 7 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di dalam rapat pembuatan kebijakan BUMDes relatif kurang. Hal tersebut karena hanya beberapa saja dari masyarakat yang mau untuk menyampaikan aspirasinya kepada BUMDes. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Moroberkah yang mengatakan :

“Kalau menurut saya, masyarakat harus diberikan keyakinan kepada mereka untuk bisa menyuarakan pendapat mereka, karena saya melihat masih banyak diantar perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut yang belum berani untuk menyampaikan aspirasinya. Kita selaku pengurus BUMDes tentunya terbuka mas, dalam artian mau itu kritikan, hinaan, atau masukan akan kita terima sebagai bahan evaluasi” (Wawancara Abdullah Faqihudin 18 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Mororejo masih kurang dalam hal menyampaikan aspirasinya kepada BUMDes, kebanyakan yang hadir pada rapat hanya mengikuti keputusan yang dibuat, Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ketua RW 05 yang mengatakan :

“Sebenarnya banyak dari masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus mas di dalam rapat pembentukan kebijakan, cuman kebanyakan mereka cenderung merasa tidak percaya diri dengan pemikiran mereka sendiri. Itu tentunya sangat disayangkan ya apalagi kalo pemikirannya itu bagus kan *eman-eman* kalau tidak disampaikan” (Wawancara Bapak Thohirin 18 November 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhadi pedagang di Pantai Ngebum yang mengatakan bahwa :

“Kalau saya sendiri sebenarnya punya pikiran lain mas yang ingin saya sampaikan kepada BUMDes, saya pengen mas kalo Pantai Ngebum ini para pedagangnya bisa ditata lagi biar lebih enak lagi dipandanginya. ya tapi apa

yang ada sekarang itu juga sudah cukup baik menurut saya” (Wawancara Bapak Muhadi 7 Agustus 2023).

Menyampaikan pendapat merupakan hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Mororejo dalam wawancaranya yang mengatakan :

“Sebenarnya masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapatnya di dalam rapat seperti ini, toh rapat itu dibuat juga untuk mendengarkan suara mereka. Cuman mungkin sedikit dari mereka yang mempunyai keberanian untuk menyampaikan keluh kesah mereka” (Wawancara Bapak Mustofa Kamal 18 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa partisipasi masyarakat Desa Mororejo dalam menyampaikan pendapatnya masih kurang baik. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa ataupun BUMDes, padahal pendapat mereka sangatlah dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat disini harus lebih dimaksimalkan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa maupun BUMDes.

3. Memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/ rapat

Ketersediaan informasi/dokumentasi merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi publik kepada pemerintah atau yang membuat kebijakan. Menurut (Mulyadi, 2020) Ketidakterbukaan pemerintah dalam menyediakan dokumen publik seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan anggaran, sumber daya alam, dan aset membuat masyarakat apatis dalam memberikan data serta informasi yang sifatnya mampu menunjang kegiatan pembangunan.

Di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo, ketersediaan dokumen publik sudah dipenuhi oleh BUMDes maupun pemerintah

desa dan selalu ditunjukkan maupun disampaikan dalam setiap pertemuan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Abdullah Faqihudin yang mengatakan :

“Pasti mas. Jadi di setiap pertemuan seperti rapat laporan pertanggung jawaban dan raker pengurus BUMDes Moroberkah ini, selalu kita sampaikan terkait dengan anggaran dan laporan keuangan lainnya kepada masyarakat yang hadir. Biar apa? biar masyarakat tau dan ikut mengoreksi apabila ada kesalahan maupun penyelewengan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh kita” (Wawancara Abdullah Faqihudin 18 November 2023).

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Moroberkah, yang mengatakan bahwa :

“Kita pasti terbuka mas, bahkan kalau ada rapat kaya LPJ kemarin itu terkait dengan anggaran dan laporan lainnya selalu kita tampilkan di layar proyektor biar masyarakat pada tau dan bisa memberikan tanggapannya terkait dengan itu” (Wawancara Irawati 18 November 2023).

Hasil wawancara di atas menunjuka bahwa BUMDes Moroberkah sejauh ini telah memberikan akses informasi yang cukup kepada masyarakat terkait dengan dokumen publik. Hal tersebut dilakukan oleh BUMDes Moroberkah agar masyarakat bisa ikut memberikan saran dan masukannya terhadap proses perencanaan dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

Kondisi di lapangan menunjukan bahwa masyarakat kurang aktif terlibat dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam proses pembentukan kebijakan. Padahal data-data tersebut mampu mempermudah pemerintah desa/BUMDes Moroberkah dalam menyusun rencana pengembangan BUMDes Moroberkah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketus BPD Desa Mororejo yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat kita kurang mas dalam menyampaikan aspirasinya, saya tidak tau kenapa, mungkin mereka terlanjur percaya dengan Pemerintah desa

sama BUMDes. Jadi apapun keputusannya mereka ikut saja” (Wawancara Bapak Triyanto 30 November 2023).

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Muhadi selaku pedagang Pantai Ngebum yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat mah ngikut aja mas, yang penting gak merugikan kita aja, selama ini apa yang dibuat oleh BUMDes kita sudah baik mas, saya sebagai warga cukup mengikuti saja mas” (Wawancara Bapak Muhadi 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan data dan informasi kepada BUMDes masih kurang. Masyarakat masih belum menyadari bahwa mereka bukan hanya sebagai objek dari pembangunan, namun juga subjek yang mampu mengarahkan bagaimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Data-data dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam pengembangan BUMDes Moroberkah. Kurangnya data dan informasi dari masyarakat membuat kebijakan atau program yang dihasilkan tidak bisa maksimal.

Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui cara-cara yang santun. Masyarakat harus diberikan keyakinan bahwa mereka bukan sekedar objek dari pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan.

4. Keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan kebijakan

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembuatan kebijakan memiliki banyak manfaat khususnya dalam segi pendidikan politik masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Supriatna dalam (Mulyadi, 2020) “perencanaan pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya memiliki arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Masyarakat perlu diberikan *empowerment* (pemberdayaan) dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan namun juga ikut menentukan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Direktur BUMDes Moroberkah, yang mengatakan bahwa :

“Di BUMDes ini masyarakat tidak hanya dilibatkan di dalam tahap perencanaan saja mas, tapi masyarakat juga hadir dalam menentukan kebijakan itu sendiri. Seperti dalam membahas mengenai gaji petugas pengambil sampah dan penjaga tiket pantai ngebum juga masyarakat dilibatkan” (Wawancara Bapak Abdullah Faqih 18 November 2023).

Seringkali di dalam proses pembentukan kebijakan, masyarakat hanya dilibatkan di dalam proses perencanaannya saja, keputusan final biasanya ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Namun di dalam proses pembuatan kebijakan di BUMDes Moroberkah Desa Mororejo, masyarakat juga ikut dilibatkan dalam menyusun kebijakan tersebut secara langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Agus selaku penjaga loket Pantai ngebum yang mengatakan bahwa :

“Kita juga terlibat dalam membuat kebijakan yang menentukan nasib kita sendiri mas. Ada beberapa keputusan BUMDes yang kita juga ikut serta membuatnya seperti gaji saya, gaji petugas penjaga pos Pantai Ngebum, gaji petugas pengambil sampah, dan yang lainnya mas” (Wawancara Bapak Agus 30 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Mororejo juga ikut dalam merumuskan kebijakan, dan tidak hanya dalam tahap perencanaannya saja. Pengurus BUMDes Moroberkah menyadari bahwa dalam membuat kebijakan yang strategis seperti itu, tidak bisa jika tanpa adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya, karena apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut, memungkinkan timbulnya pro dan kontra ditengah masyarakat.

Teori Cohen mengatakan bahwa dalam proses perencanaan kebijakan, terdapat hubungan konsultatif dan kemitraan antara pihak pejabat pengambil

keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, Dalam peran serta/konsultatif masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan ataupun kritiknya kepada Pemerintah desa ataupun BUMDes untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, dan diberitahu keputusan akhirnya oleh pengambil keputusan, masyarakat yang bersifat kemitraan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pejabat yang bermitra, artinya mereka membahas masalah, mencari alternative solusi dan membahas keputusan secara bersama-sama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi perencanaan kebijakan oleh BUMDes, masyarakat Mororejo turut berpartisipasi secara aktif dengan menghadiri rapat perencanaan progam kerja yang diadakan oleh BUMDes Moroberkah. Namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan/saran kepada BUMDes dalam rapat tersebut kurang aktif, hanya dua orang saja dari perwakilan masyarakat yang berbicara pada saat rapat tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BUMDes Moroberkah memiliki kedudukan yang sejajar dengan masyarakat yang bermitra dengan BUMDes, masyarakat terutama pelaku usaha Pantai Ngebum dan petugas sampah selaku mitra BUMDes selalu dilibatkan dalam membahas persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan mereka, seperti gaji petugas sampah, petugas loket, dan bagi hasil pelaku uaha Pantai Ngebum

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan dalam pembangunan. Dibutuhkan unsur-unsur dalam pelaksanaan progam, hal ini menyangkut penggerakan sumber daya dan dana yang dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan (Cohen, 1980). Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Hasil dari perencanaan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang selanjutnya harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo, ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat di dalam 2 unit usaha yang berjalan, yaitu :

1. Unit Usaha Sampah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan unit usaha sampah BUMDes Moroberkah merupakan sebuah kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Mororejo. Sejak dulu masalah sampah menjadi hal yang mendasar bagi masyarakat Desa Mororejo. Masalah sampah ini disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai tempat pembuangan sampah khusus yang diadakan oleh desa. Hal tersebut berakibat banyaknya sampah-sampah yang menumpuk disekitaran pemukiman warga yang menyebabkan bau yang tidak sedap dan juga mengganggu pandangan mata.

Partisipasi masyarakat Desa Mororejo dalam pengelolaan sampah di Desa Mororejo cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya warga Mororejo yang menjadi member pengambilan sampah di Desa Mororejo, yang ditunjukkan dengan dokumen dibawah ini :

Tabel 4.6

Daftar masyarakat member pengambil sampah Desa Mororejo

RW	RT	JUMLAH RT
1	1	21
	2	12
	3	15
2	1	15
	2	17
3	6	24
4	1	36
	2	23
5	1	33

	2	27
	3	9
	4	24
	5	32
6	4	9
	5	34
6	16	331

Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Data di atas merupakan daftar masyarakat yang termasuk sebagai member/anggota pengambilan sampah oleh BUMDes Moroberkah. Data di lapangan menunjukkan bahwa hampir 95% masyarakat Mororejo telah tergabung di dalam member pengambilan sampah yang di perankan oleh BUMDes Moroberkah. Dari keseluruhan 340 rumah di Desa Mororejo, 331 rumah sudah menjadi member aktif pengambilan sampah Desa Mororejo. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan BUMDes Moroberkah cukup baik khususnya di unit usaha pengambilan sampah bisa dikatakan cukup baik.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pengurus BUMDes Moroberkah yang mengatakan :

“Kami selaku pengurus BUMDes tentunya sangat bergantung mas kepada masyarakat dalam rangka menjalankan progam-progam kami. Terutama dalam unit usaha sampah, disini kita betul-betul mengharap keluasan hati masyarakat untuk mau membantu kita terutama kesedianya untuk membaayr biaya retribusi untuk menggaji petugas-petugas pengambil sampah.” (Wawancara Ibu Diyana 3 Agustus 2023)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan unit usaha sampah, BUMDes Moroberkah sangat mengharapkan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal menggaji petugas pengambil sampah. Karena, di dalam unit

usaha ini masyarakat dimintai iuran sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
Diyana dalam wawancara dengan peneliti menambahkan bahwa :

”Kalo unit usaha sampah sendiri mas, itu masyarakat dikenai biaya sebesar 15.000 setiap bulan, nah nanti uang itu digunakan untuk membayar tenaga yang ngambilin sampah itu mas, Alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar” (Wawancara dengan Ibu Diyana pada 3 agustus 2023)

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan unit usaha sampah ini cukup baik. Masyarakat mendukung penuh program pengambilan sampah ini, dikarenakan dengan adanya program pengambilan sampah ini menjadikan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, tidak ada sampah yang menumpuk atau menimbun sehingga mengganggu pandangan dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Silviana salah satu warga RW 04 yang juga ikut serta dalam tim pengambil sampah di RT 1 RW 04, yang mengatakan bahwa :

“Semenjak adanya program pengambilan sampah ini yaa jadi lebih bersih aja mas, tak kira masyarakat ga masalah dimintai retribusi 15.000 perbulan toh itu lebih murah dari pada ngambil jsa dari luar. jadinya mereka ga buang sampah sembarangan, jadi lebih bersih aja gitu. Walaupun kita belum punya pengolahan sampah sendiri ya, paling hanya dipisah saja sampah organik dan non organiknya untuk kemudian bisa dijual kembali ke pengumpul sampah.” (Wawancara Silviana 18 November 2023).

Lebih lanjut silviana dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Sejauh ini di RW saya khususnya RW 04 itu sudah berjalan dengan baik mas, belum pernah ada warga yang protes karena harus bayar 20.000, karena menurut saya ga masalah kita harus bayar 20.000 perbulan dengan konsekuensi lingkungan kita jadi lebih bersih dan sehat sehingga jauh dari penyakit.” (Wawancara Silviana 18 November 2023).

Wawancara di atas menunjukkan bahwasanya setiap warga Mororejo pada umumnya merasa sangat antusias dengan adanya program pengambilan sampah ini,

adanya program ini membuat masyarakat jadi tidak membuang sampah sembarangan. Dengan membayar Rp.15.000 perbulan, hasil dari partisipasi masyarakat tersebut akan kembali lagi pada masyarakat dalam bentuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam pelaksanaan unit usaha sampah ini, seluruh masyarakat Desa Mororejo dilibatkan tanpa terkecuali, hanya beberapa orang saja yang masih bersikukuh menggunakan jasa pengambilan sampah dari luar desa yang memiliki tarif lebih mahal. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Unit Usaha Sampah BUMDes Mororejo, yang mengatakan :

“Alhamdulillah mas, masyarakat semuanya dari ujung sana sampai sana lagi telah dilibatkan di dalam unit usaha kita ini. Hanya beberapa orang saja yang enggan untuk menggunakan jasa pengambilan sampa dari kita dan memilih menggunakan (Wawancara Fajar 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung unit usaha sampah ini sudah cukup baik karena mayoritas masyarakat telah tergabung dalam member pengambilan sampah oleh BUMDes Moroberkah. Namun, masih terdapat kendala di lapangan yang ditunjukkan dengan masih ada warga dari Desa Mororejo yang enggan untuk menggunakan jasa pengambilan sampah dari BUMDes Moroberkah. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi bagi BUMDes agar pelaksanaan program kerja ini bisa menyeluruh kepada seluruh masyarakat Desa Mororejo.

2. Unit Usaha Pariwisata

Desa Mororejo memiliki keunggulan khususnya dibidang pariwisata, hal tersebut dikarenakan adanya Pantai Ngebum yang sampai saat ini masih menjadi salah satu ikonik di Kecamatan Kaliwungu. Pantai Ngebum sendiri tidak pernah sepi dari wisatawan yang berkunjung kesana, tercatat bahwasanya wisatawan Pantai Ngebum pernah menembus angka 5000 pengunjung dalam sehari pada awal 2022 lalu. Dengan tingkat kunjungan yang cukup tinggi, tentunya dibutuhkan

tenaga yang ekstra untuk menjaga dan mengoperasikan Pantai Ngebum dengan sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan pengelolaan Pantai Ngebum, BUMDes Moroberkah memanfaatkan SDM di Desa Mororejo untuk menjadi petugas pengelola di Pantai Ngebum. Selain itu BUMDes Moroberkah juga menyediakan tempat untuk masyarakat yang ingin berjualan di sekitaran Pantai dengan harapan agar mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Bahrul Ulum selaku Sekretaris BUMDes Moroberkah dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“eee semua petugas yang ada disana itu semua orang-orang kita mas, mulai dari penjaga loket, tukang parkir, penjaga kebersihan, pedagang dan yang lain itu kita utamakan dari masyarakat Mororejo. Karena setidaknya dengan begitu kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran disini.” (Wawancara Bahrul Ulum 18 November 2023).

Pengelolaan pantai ngebum saat ini dipegang oleh BUMDes Moroberkah, dalam menjalankan operasional Pantai Ngebum agar terus menjadi tujuan wisata yang dapat diandalkan di Kabupaten kendal, BUMDes Moroberkah menggandeng masyarakat Mororejo untuk mengambil bagian dalam pengelolaan pantai. Hal tersebut dirasa penting karena tentunya tidak mungkin bisa terlaksana apabila hanya mengandalkan pengurus BUMDes saja.

Abdullah Faqihudin selaku Direktur BUMDes Moroberkah dalam wawancaranya menyampaikan :

“Terkait operasional Pantai Ngebum tentunya kalo BUMDes sendiri yang mengurus ndak bisa mas, makanya kita disini sangat mengandalkan tenaga dari masyarakat untuk ikut serta membantu BUMDes (Wawancara M.Faqihudin 3 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya BUMDes melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha pariwisatanya. BUMDes Moroberkah merasa tidak sanggup apabila harus menjalankan unit usaha pariwisatanya tanpa andil dari masyarakat setempat. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Rudi, selaku penjaga karcis di Pantai Ngebum dalam wawancara pada 11 Agustus 2023 mengatakan :

“Saya sudah 3 tahun mas jadi tukang jaga karcis disini, ya Alhamdulillah hasilnya lumayan. Kebanyakan yang bekerja disini itu warga lokal sini semua mas, iya soalnya ya daripada *wong liyo* kan mending dari warga sendiri mas gitu. Kalo orang BUMDes semua yang ngatur gabisa mas, mustahil” (Wawancara Rudi 11 Agustus 2023).

Ketidakmampuan BUMDes dalam menjalankan unit usaha pariwisata mengharuskan BUMDes untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaannya. Hal tersebut menjadikan para pelaku usaha di Pantai Ngebum mayoritas dipegang oleh warga Desa Mororejo sendiri. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Rohayah selaku pedagang di Pantai Ngebum dalam wawancara pada 11 Agustus 2023, yang mengatakan :

“Haah mas disini mulai dari yang jaga karcis sampai yang bersih-bersih itu dari Mororejo semua, Kalo saya pedagang disini udah dari dulu mas sebelum diurus sama BUMDes saya sudah berjualan disini”

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pengelolaan Pantai Ngebum. Tanpa partisipasi dari masyarakat Mororejo untuk meningkatkan pelayanan di Pantai Ngebum bukan tidak mungkin bahwa Pantai Ngebum akan sepi dari wisatawan yang berkunjung, mengingat salah satu faktor yang menarik wisatawan untuk berlibur ke Pantai Ngebum adalah karena banyaknya warga lokal yang berjualan disana untuk menyediakan jajanan dan makanan ringan lainnya guna memenuhi keinginan para pengunjung Pantai Ngebum.

Keterlibatan masyarakat menjadikan pengelolaan Pantai Ngebum menjadi lebih efektif dan efisien, juga mengurangi beban pengurus BUMDes dalam hal

tenaga. Sehingga BUMDes bisa maksimal dalam menjalankan program-program dan unit usaha lainnya.

Masyarakat Desa Mororejo hampir memegang seluruh usaha yang berada di Pantai Ngebum. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari BUMDes Moroberkah dan tercantum di dalam AD/ART BUMDes. Ibu Diyana salah seorang pengurus BUMDes Mengatakan bahwa :

“Jadi seluruh usaha yang ada di pantai ngebum ini dipegang oleh warga Mororejo semua mas, itu karena sudah menjadi kewajiban BUMDes untuk mengutamakan warga Mororejo sendiri, tetapi masyarakat tetap melakukan bagi hasil dengan BUMDes yaitu sebesar 250 ribu perbulan” (Wawancara Ibu Diyana 30 November 2023).

Dalam menjalankan unit usahanya, BUMDes Moroberkah harus dan wajib mengutamakan warga mororejo sendiri untuk menjadi mitra di dalam menjalankan usaha BUMDes. Sudah menjadi kesepakatan bersama dengan masyarakat dan pemerintah, bahwa di dalam operasional unit usaha BUMDes Moroberkah, masyarakat Mororejo harus dilibatkan sebagai mitra usaha dan tidak diperbolehkan untuk melibatkan warga lain di luar Desa Mororejo.

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh dokumen dibawah ini

Gambar 4.11

Daftar Pelaku Usaha Pantai Ngebum

DAFTAR PELAKU USAHA PANTAI NGEBUM

NO	NAMA	JENIS USAHA
1	Bu Umul	Warung
2	Bu Kusni	Lapak
3	Daekah	Tikar/Pelampung
4	Soedah	Tikar/Pelampung
5	Fauzin	Warung/M.Bilas
6	Yanto	Tikar/Pelampung
7	Sopyan	Warung/M.Bilas
8	Ibad	Warung/M.Bilas
9	Sukriyah	Warung/M.Bilas
10	Umi	Warung/M.Bilas
11	Lastri/Rokim	Pelampung
12	Kotim	Warung/M.Bilas
13	Nasir	Tikar/Pelampung
14	Mak Sop	Warung/M.Bilas
15	Umi/Zam	Tikar/Pelampung
16	Zumrotun	Tikar/Pelampung
17	Dewi(10th)	Tikar
18	Juni/Edi	Tikar/Pelampung
19	Elvi	Tikar
20	Ema	Tikar/Pelampung
21	Sapuk	Kursi
22	Mb.Mis	Tikar/Pelampung
23	Mus	Tikar/Pelampung
24	Patemi	Tikar/Pelampung
25	Zaroah	Warung/M.Bilas
26	Lastri	Tikar/Pelampung
27	Yadi	Kursi
28	Samiran	Tikar/Pelampung
29	Ginem	Warung/M.Bilas
30	Jum	Tikar
31	Har	Tikar/Pelampung
32	Sri	Warung/M.Bilas
33	Yanti	Atv
34	Somat	Kursi
35	Rohman	Tikar/Pelampung
36	Ponirin	Tikar/Pelampung
37	Jaman	Warung
38	Wahyudi	Mandi Bilas
39	Junaidi	Warung
40	Rusmiyati	Warung/M.Bilas
41	Layla	Warung Tempel
42	Matoki	Kursi
43	Sri/Tianah	Mekanik
44	H.Yusuf/Sajiyo	Mandi Bilas
45	Santi	Warung/M.Bilas
46	Bahun	Lapak Baju
47	Wondo	Warung/M.Bilas
48	Ali	Trail
49	Nur	Karyawan
50	Alkomah	Warung/M.Bilas
51	Ria	Warung+Warung Tempel
52	Tris	Lapak Lontong Campur
53	Sri	Warung/M.Bilas
54	Bunga	Warung Tempel
55	Mbah Tik	Operator
56	Reni	Warung Gorengan
57	Wita	Mandi Bilas
58	Yati	Warung+Parkir
59	Kafidin	Karyawan
60	Amat	Warung Tempel
61	Kuriman	Warung
62	Wasilah	Parkir
63	Luluk	Parkir
64	Majari	Warung Tempel
65	Misbah	Parkir
66	Nur/Podin	Warung Tempel

Sumber : Arsip BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Dokumen di atas menunjukkan jumlah warga masyarakat Mororejo yang menjadi pelaku usaha di Pantai Ngebum. Hampir dari seluruh usaha yang ada di

Pantai Ngebum dipegang oleh masyarakat Mororejo sendiri. Hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program BUMDes cukup baik, karena di dalam pelaksanaannya masyarakat terlibat penuh untuk mengambil bagian dalam melaksanakan program BUMDes dengan menjadi pelaku usaha.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sangatlah dibutuhkan dalam mendukung program-program BUMDes Moroberkah, adanya partisipasi masyarakat secara langsung mempermudah BUMDes dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena masyarakat sendiri yang merasakan hasil dari adanya program BUMDes tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan menurut pandangan Cohen (1980) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, uang, barang/ material. Di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo, masyarakat terlibat dalam beberapa pelaksanaan program BUMDes Moroberkah. Kontribusi masyarakat di dalam pelaksanaan program BUMDes dapat dilihat pada unit usaha pariwisata. Keterlibatan masyarakat di dalam unit usaha pariwisata merupakan hal yang sangat sentral karena mampu menunjang eksistensi Pantai Ngebum hingga saat ini. Kontribusi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk bermitra dengan BUMDes dengan berjualan di Pantai Ngebum, Membantu BUMDes dalam menjalankan operasional Pantai Ngebum dengan mengisi bagian tiketing, parkir, hingga kebersihan. Masyarakat Desa Mororejo selaku pelaku usaha yang menjalankan usaha di pantai Ngebum juga membayar 250 ribu pendapatannya untuk BUMDes Moroberkah., artinya selain mengorbankan tenaganya untuk berjualan di Pantai Ngebum, masyarakat juga berkontribusi dalam memberikan tambahan pendapatan untuk BUMDes Moroberkah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain itu di dalam unit usaha pengambilan sampah, masyarakat juga terlibat aktif dalam mendukung program BUMDes tersebut, keterlibatan masyarakat di dalam unit usaha ini yaitu dengan turut menjadi member pengambilan sampah dan membayar sebesar 15 ribu rupiah perbulan. Keterlibatan masyarakat di dalam unit usaha pengambilan sampah

sangatlah penting, dengan masyarakat ikut terlibat menjadi member pengambilan sampah, artinya masyarakat turut berkontribusi kepada BUMDes Moroberkah dalam menggaji petugas pengambil sampah dan menambahkan pendapatan BUMDes Moroberkah. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah didominasi oleh kontribusi berupa tenaga, dan uang, bukan dengan bahan material.

C. Partisipasi masyarakat dalam kemanfaatan

Partisipasi dalam kemanfaatan, partisipasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya. Partisipasi ini melihat sejauh mana program-program dari BUMDes Moroberkah memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat Desa Mororejo.

Participation in Benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud partisipasi dimana dengan keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat (Mulyadi, 2020).

Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan keluaran/*output* yang dihasilkan dari program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes selaku objek penelitian dalam penelitian ini. Berikut ini partisipasi masyarakat dalam mengambil manfaat dari adanya BUMDes Moroberkah :

1. Memberikan Tambahan Pendapatan Asli Desa

Manfaat dari adanya BUMDes Moroberkah selain bisa dirasakan oleh masyarakat, juga bisa dirasakan oleh pemerintah Desa. Hal tersebut karena BUMDes mampu menambah PAD Desa Mororejo hingga 400 juta pertahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Mustofa Kamal selaku Kepala Desa Mororejo, yang mengatakan :

“Partisipasi masyarakat untuk BUMDes Moroberkah saat ini sudah mulai bisa dirasakan mas, baik dalam unit usaha pariwisata, unit usaha sampah, maupun penyewaan lapangan. Dari kita pemerintah desa juga bisa merasakan manfaat dari adanya keterlibatan masyarakat di dalam BUMDes ini, karena kita juga menerima kurang lebih 300-400 juta pertahun dari

BUMDes. Nah dana tadi itu bisa kita gunakan untuk menopang pembangunan desa atau kegiatan desa lainnya. (Wawancara pada Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Suyuti selaku sekretaris Desa Mororejo yang mengatakan :

“Iya mas, semenjak ada BUMDes ini PAD kita jadi bertambah. Dulu waktu dipegang oleh swasta kita nggak dapet apa-apa” (Wawancara Bapak Suyuti 7 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Desa Mororejo juga merasakan hasil dari adanya BUMDes Moroberkah. Partisipasi dalam kemanfaatan menghendaki adanya manfaat yang diperoleh oleh pemerintah atau masyarakat berkat partisipasi tersebut. Adanya partisipasi masyarakat di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah menjadikan pendapatan asli Desa Mororejo bertambah, sehingga mampu menopang progam-progam pembangunan yang dilakukan oleh desa.

2. Lingkungan menjad lebih bersih

Manfaat keberadaan BUMDes Moroberkah juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam kebijakan pengambilan sampah. Masyarakat mengaku dengan adanya unit usaha sampah dinaungi oleh BUMDes Moroberkah membuat lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan tidak bau, mengingat isu lingkungan menjadi masalah yang strategis di Desa Mororejo.

Kepala Desa Mororejo mengungkapkan bahwa keberadaan BUMDes Moroberkah sangat berdampak baik bagi lingkungan, hal tersebut ia sampaikan ketika wawancara dengan peneliti yang mengatakan :

“Kondisi lingkungan kita saat ini jadi semakin bagus mas, sejak dikelola oleh BUMDes. Soalnya sebelum ada BUMDes itu sampah berserakan dimana-mana karena masyarakt gak punya tempat pembuangan khusus,

sekarang sudah tertata dengan rapi semuanya” (Wawancara Bapak Mustofa Kamal 7 Agustus 2023).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rudi selaku warga RW 03 yang mengatakan :

“Dulu sebelum ada BUMDes itu warga buang sampah sembarangan mas, kadang di selokan depan rumah, kadang di pinggir jalan, pokoknya gak teratur, Alhamdulillah sekarang jadi semakin baik mas sejak ada yang ngambil sampah dari BUMDes” (Wawancara Rudi 18 November 2023).

Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan unit usaha sampah juga sangat diperlukan oleh BUMDes. Masyarakat dikenai biaya retribusi sebesar 15.000 ribu rupiah setiap kepala keluarga yang menggunakan jasa pengambilan sampah oleh BUMDes Moroberkah

Direktur BUMDes Mororejo, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan unit usaha sampah ini masyarakat diminta biaya retribusi sebesar 15.000 rupiah mas, tapi dengan begitu masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Bisa menghidupi warga lain yang menjadi petugas sampah.” (Wawancara Bapak Mustofa Kamal 7 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Kontribusi masyarakat dengan menjadi member pengambilan sampah BUMDes Moroberkah, secara langsung berdampak terhadap kondisi lingkungan yang semakin bersih dan sehat. Selain itu bentuk kontribusi masyarakat di dalam unit usaha ini juga membantu memberikan pekerjaan kepada petugas pengambil sampah yang juga merupakan warga Desa Mororejo sendiri.

3. Menggaji guru TPQ, MDTU, dan Marbot Masjid

Dampak dari adanya BUMDes tidak hanya dapat dilihat secara fisik, namun juga non fisik. Dalam aspek sosial, BUMDes Moroberkah juga telah banyak

membantu masyarakat khususnya guru-guru TPQ, MDTU, dan marbot masjid yang dari dulu belum pernah mendapatkan gaji pokok dari Pemerintah Desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala Desa Mororejo mengungkapkan bahwa:

“Saat ini BUMDes sudah banyak membantu masyarakat mas terutama dalam menggaji para guru ngaji di TPQ, MDTU, dan marbot masjid. Sebelumnya mereka tidak pernah menerima gaji secara langsung dari desa, melainkan berupa bisyaroh dari masyarakat yang tidak bisa ditetapkan. Saat ini para guru TPQ tersebut sudah mendapatkan gaji yang lebih baik dari sebelumnya, dengan adanya BUMDes Moroberkah ini. Selain itu anak-anak yatim dan para lansia selalu mendapat tunjangan dari BUMDes setiap bulanya, itu merupakan hal yang sangat membanggakan bagi saya selaku kepala desa.”(Wawancara pada Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Desa Mororejo menunjukan bahwa saat ini masyarakat semakin terbantu dengan adanya BUMDes, guru-guru TPQ dan MDTU, anak-anak yatim piatu, dan lansia semakin mendapatkan perhatian dari desa. Hal tersebut didukung oleh hasil telaah dokumentasi yang diabadikan dalam dokumen berikut ini :

Gambar 4.12

Penyerahan dana sosial BUMDes Moroberkah



Sumber : Dokumentasi BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Gambar 4.13



Sumber : Dokumentasi BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Gambar di atas adalah foto pada saat penyerahan gaji Guru TPQ, MDTU, dan Marbot Masjid desa Mororejo oleh BUMDes Moroberkah yang dihadiri oleh pemerintah Desa Mororejo dan perwakilan masyarakat desa Mororejo.

Data tersebut menunjukkan adanya perubahan yang baik oleh masyarakat dari sebelum adanya BUMDes dan setelah ada BUMDes. Masyarakat juga selalu dilibatkan dalam semua kegiatan BUMDes, hingga kegiatan religius seperti buka bersama dan santunan anak yatim. Hal tersebut dapat membawa hubungan yang harmonis antara pengurus BUMDes dan masyarakat, sehingga diantara keduanya tidak ada keraguan untuk saling mengkritik dan memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan Desa Mororejo.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes Moroberkah Abdullah Faqihudin, yang mengatakan :

“Secara tidak langsung mas, ketika masyarakat ikut membantu progam-progam kita, ikut membayar iuran sampah, ikut menjalankan usaha-usaha di Pantai Ngebum, itu sama saja mereka juga ikut membantu kita dalam memberikan hak-haknya para guru TPQ, guru-guru MDTU, sama marbot masjid mas”(Wawancara pada Bapak Faqih 3 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah selain memberikan manfaat kepada BUMDes sendiri, namun juga berdampak positif kepada masyarakat luas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan (Cohen, 1980) yang mengatakan bahwa partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana di dalam partisipasi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibataan masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah telah membawa kemanfaatan terhadap pemerintah desa dan masyarakat secara luas. Adanya kontribusi masyarakat disini telah membawa perubahan yang baik terutama soal kebersihan lingkungan, menggaji guru-guru TPQ, MDTU da marbot masjid, kemudian partisipasi masyarakat di dalam pengembangan BUMDes Moroerkah ini

juga berdampak terhadap pendapatan desa, yang mana pemerintah Desa Mororejo menerima hasil usaha dari masyarakat dan BUMDes dalam bentuk pendapatan asli desa.

D. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan tahap terakhir dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja Kinerja BUMDes Moroberkah cukup berhasil, hal tersebut dilihat dari tanggapan masyarakat yang baik terhadap program kerja BUMDes dan *output* yang dirasakan oleh masyarakat Desa Mororejo sendiri.

Gambar 4.14 kondisi pada saat rapat evaluasi kepengurusan BUMDes Moroberkah pada 25 Desember 2022 tahun lalu.



Sumber : Dokumentasi BUMDes Moroberkah Desa Mororejo

Gambar di atas merupakan kondisi pada saat rapat evaluasi kepengurusan BUMDes Moroberkah yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Rapat tersebut

melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terlihat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah, mulai dari para pelaku usaha Pantai Ngebum, petugas pengambil sampah, Perwakilan RW, dan unsur lain dari masyarakat serta Pemerintah Desa Mororejo.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program kerja BUMDes merupakan penilaian dari program kerja yang sudah berjalan, tujuannya agar masyarakat mengetahui apakah pelaksanaan program kerja yang berjalan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau belum, sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang menghambat berjalannya program kerja tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDes Moroberkah M Faqihudin ketika ditanya tentang bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap program kerja yang berjalan, beliau mengatakan :

“Dalam melaksanakan program kerja BUMDes, partisipasi masyarakat sangat berarti bagi kami selaku pengurus BUMDes, karena dengan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, pembangunan akan cepat terealisasi dan kemungkinan terjadi pro dan kontra setelahnya sangat minim, karena masyarakat ikut terlibat di dalamnya.”(Wawancara Abdullah Faqih 3 Agustus 2023).

Menurut M. Faqihudin selaku Direktur BUMDes Moroberkah partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan bisa terealisasi dengan cepat dan meminimalisir konflik setelahnya, karena masyarakat ikut dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Muhadi selaku perwakilan pedagang dalam wawancaranya beliau menambahkan bahwa :

“Pelaksanaan program kerja BUMDes nggak bakal bisa berjalan baik mas, kalo masyarakat nggak dilibatkan, pasti ini!. Soalnya nanti yang akan terjadi adalah program yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, dan rawan terjadi korupsi karena masyarakat tidak bisa ikut serta mengawasi.”(Wawancara pada Bapak Agus 6 Agustus 2023).

Penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa pelaksanaan program kerja BUMDes sudah semestinya melibatkan masyarakat di dalamnya, karena apabila tidak, akan dikhawatirkan menjadi peluang untuk korupsi karena masyarakat tidak bisa mengawasi.

Pendapat tersebut kemudian ditanggapi oleh Triyanto selaku ketua BPD dalam wawancara tentang bagaimana masyarakat bisa mengevaluasi program kerja dari BUMDes Moroberkah beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat di dalam evaluasi ini sangat penting mas, mereka sangat aktif menanggapi ketika pengurus BUMDes selesai memaparkan laporan mereka, artinya di sini keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan mas, karena mereka sendiri yang bisa merasakan hasil dari adanya BUMDes ini.”(Wawancara pada Bapak Triyanto 6 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat harus selalu dilibatkan dalam evaluasi program kerja BUMDes, hal tersebut oleh sebagian masyarakat dirasa penting karena apabila masyarakat tidak dilibatkan, berjalanya lembaga BUMDes akan semena-mena dan rawan akan praktik korupsi.

Hasil penelitian di atas menyebutkan bahwa masyarakat ikut aktif dalam mengevaluasi kinerja dari BUMDes Moroberkah. Keberadaan masyarakat di tengah-tengah rapat evaluasi sangat diperlukan untuk menjaga netralitas dari adanya rapat tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan (Cohen, 1980) bahwa partisipasi masyarakat dalam menilai dan mengevaluasi hasil-hasil perencanaan sangat penting. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

BAB V

ALASAN YANG MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN BUMDES MORO BERKAH

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dimana masyarakat tersebut tinggal. Partisipasi masyarakat biasanya disertai dengan alasan-alasan yang mendorong masyarakat tersebut ikut berpartisipasi. Dalam pengembangan BUMDes Moroberkah, dimana masyarakat ikut terlibat sepenuhnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi keterlibatan tersebut.

A. Adanya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan faktor intern yang timbul dalam diri masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa. Suhaimin Taidin Notoatmodjo dalam (Budiharjo, 2017) kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan, sadar dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.

Masyarakat Desa Mororejo memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusianya jika dinilai dari tingkat pendidikannya, hal tersebut menjadi salah satu faktor baik tidaknya partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, masyarakat cenderung senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan baik yang diselenggarakan oleh desa maupun BUMDes. Menurut mereka dengan mengikuti kegiatan baik desa maupun BUMDes mereka merasa ikut berandil dan berkontribusi dalam memajukan desa sehingga muncul rasa memiliki terhadap Desa Mororejo. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Thohirin selaku Ketua RW 05 Pada mengatakan bahwa :

“Masyarakat kita senang mas kalau disuruh mengikuti kegiatan BUMDes, asalkan ada yang *ngopyaki* karena masyarakat kita itu pengen desa kita itu bisa maju dan dikenal lebih luas lagi gitu, kalau misal ada kegiatan misal kerja bakti atau apa gitu tinggal diumumkan di masjid sama mushola gitu saja nanti mereka udah kumpul sendiri” (Wawancara pada Bapak Thohirin 3 Agustus 2023).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mororejo pada umumnya memiliki kesadaran yang baik untuk terlibat dalam pembangunan desa. Wawancara di atas juga menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memiliki rasa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa, namun lebih efektif lagi apabila ada yang menggerakkan terutama dari masyarakat sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Direktur BUMDes Moroberkah Abdullah Faqihudin yang mengatakan :

“eeee masyarakat kita itu sebenarnya gampang mas, asal ada yang ngajak gitu. kalo mau ada kegiatan kaya bersih-bersih pantai gitu ya mas, yang melibatkan masyarakat banyak itu biasanya kita juga minta tolong sama ketua karang taruna buat istilahnya mengajak teman-temannya untuk bisa hadir, juga sama ketua RW masing-masing untuk disiarkan di mushola masing-masing. Tapi selain itu juga kita umumin di masjid juga mas” (Wawancara M. Faqihudin 18 November 2023)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengajak masyarakat lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan desa. Dengan adanya masyarakat yang membantu BUMDes mengajak anggota masyarakat lain untuk ikut serta dalam kegiatan, menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ikut dalam kegiatan desa, atau yang ingin sekali ikut namun merasa malu, menjadi tidak malu dan tidak ragu lagi dalam mengikuti kegiatan BUMDes maupun kegiatan yang diadakan oleh desa.

Pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan memberikan nilai moral yang mampu membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat desa untuk senantiasa membantu dalam hal pembangunan desa. Sehingga tercipta sebuah sinergitas antara pemerintah dan masyarakat desa untuk sama-sama melaksanakan pembangunan desa. Kepala Desa Mororejo dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Jadi antara desa dan masyarakat itu harus saling membantu mas, misalnya gini, kalo ada kegiatan RT kayak agustusan atau yang lainnya, kalo kita diundang ya kita dateng, syukur kalo kita bisa bantu ya kita bantu danai. Jadi dengan begitu, ketika kita mengadakan kegiatan yang mengundang warga otomatis banyak datang, karena mereka pasti merasa tidak enak karena sudah kita bantu, jadi begitu mas intinya timbal balik antara desa dan warga itu penting.”(Wawancara Kepala desa Mororejo 6 Agustus 2023).

Wawancara di atas menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat Mororejo secara khusus. Dari masyarakat akan timbul perasaan ingin berbalas budi karena pemerintah desa sudah banyak membantu, sehingga hal tersebut berdampak pada partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan desa termasuk kegiatan BUMDes Moroberkah.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Thohirin Ketua RW 05 yang mengatakan :

“Masa kita gak mau ikut mas, lha wong pak lurah juga udah banyak bantu kita juga, jadi ya kita juga harus bantu juga” (wawancara dengan Bapak Thohirin Ketua RW 05 18 November 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu program-program desa. Hubungan saling menguntungkan antar keduanya harus terjalin dengan baik, Sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi dengan pendapat Goldsmith yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan di dalam organisasi yang sudah dikenal/yang sudah ada sebelumnya, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah adalah karena kesadaran masyarakat sendiri, masyarakat pada umumnya memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi disekitarnya yang kemudian mendorong naluri masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Moroberkah. Selain itu adanya dorongan atau ajakan dari masyarakat lain juga memicu partisipasi masyarakat, karena banyak warga masyarakat yang merasa memiliki keinginan untuk ikut serta, namun mereka akan cenderung berpartisipasi apabila ada warga lain yang mengajaknya. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa peran pemerintah cukup vital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan memanfaatkan organisasi yang sudah ada di masyarakat seperti karang taruna dan RT, sehingga masyarakat terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes. Jika teori Goldsmith mengatakan bahwa partisipasi masyarakat ada karena melalui organisasi yang sudah dikenal, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya sudah memiliki kesadaran akan kepedulianya terhadap desa sendiri, akan tetapi peran organisasi masyarakat juga diperlukan untuk mendorong rasa kepedulian tersebut agar masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi.

B. Partisipasi memberikan keuntungan kepada masyarakat

Pengembangan Bumdes Moroberkah Desa Mororejo semestinya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, karena badan usaha tersebut dibentuk tidak lain untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya, maupun memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Masyarakat seharusnya memperoleh manfaat dari program kerja yang dihasilkan, karena apabila masyarakat tidak mendapat apapun dari program BUMDes, Hal tersebut akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes Moroberkah.

Kepala Desa Mororejo Mustofa Kamal selaku Kepala Desa Mororejo dalam wawancara pada 3 Agustus 2023 yang mengatakan bahwa :

“BUMDes harus menjadi pintu gerbang meningkatnya ekonomi masyarakat, karena apabila BUMDes kita berhasil, tak sedikit masyarakat yang akan terbantu, begitu juga sebaliknya, kalo BUMDes kita gagal itu akan merugikan masyarakat karena modal yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes hanya sia-sia.”(Wawancara pada Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan BUMDes dilihat dari seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Semakin besar manfaat semakin besar pula tingkat keberhasilan BUMDes Moroberkah.

Sedangkan Triyanto Selaku Ketua BPD Mororejo berpendapat bahwa sejauh ini sudah banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari BUMDes, hal tersebut dikatakannya dalam wawancara pada 6 Agustus 2023 yang mana ia mengatakan bahwa :

“Berjalanya BUMDes, selama kurang lebih 4 tahun ini sudah banyak membantu masyarakat mororejo mas, terutama dalam menggaji para Guru TPQ, MDTU, dan marbot masjid. Juga masyarakat yang terlibat dalam pemilahan sampah juga mendapatkan intensif tersendiri dari BUMDes. Itu karena kita selaku masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi semuanya kita terlibat, itu yang menjadi kunci kesuksesan BUMDes kita ini.”(Wawancara pada Bapak Triyanto 6 Agustus 2023).

Dari penjelasan di atas bahwasanya BUMDes Moroberkah sejauh ini sudah banyak membantu masyarakat Desa Mororejo, tetapi salah satu yang menjadi faktor dibalik kesuksesan BUMDes yaitu partisipasi masyarakat. Karena masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai objek tetapi juga

menjadi subjek yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasinya kepada BUMDes.

Masyarakat akan cenderung melihat sisi ekonomis dari sebuah kegiatan yang diadakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rondi selaku warga RT 3 RW 1 yang menjadi petugas pengambil sampah oleh BUMDes Moroberkah mengatakan bahwa :

“Yaa Alhadulillah mas dulu saya nganggur, terus dari 2021 saya mulai ikut mengambil sampah sama temen-temen yang lain, saya bilang ke pengurus BUMDes buat jadi tukang ngambil sampah. Yaa Alhamdulillah boleh, yaa lumayan mas walaupun ga banyak tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainya mas.”(Wawancara pada Ibu Supiah 6 Agustus 2023).

Pendapat tersebut diberikan oleh hasil wawancara dengan Devi Irawati selaku bendahara BUMDes Moroberkah yang mengatakan bahwa :

“Termasuk jasa pengambil sampah mas, itu setiap bulan juga kita gaji, untuk gajinya tidak besar hanya 700 ribu rupiah, tapi itu semua sudah disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat rapat dulu” (Wawancara Devi Irawati 18 November 2023).

BUMDes Moroberkah menugaskan salah seorang warganya untuk menjadi petugas pengambil sampah di Desa Mororejo. Petugas tersebut mengambil sampah sebanyak satu kali dalam seminggu dan dibayar sebesar 700 ribu dalam sebulanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Moroberkah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut bekerjasama dengan BUMDes untuk mengembangkan wisata Pantai Ngebum, karena sejatinya hal tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Sejalan dengan pernyataanya di atas Kepala Desa Mororejo Bapak Mustofa Kamal, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Dari tahun 2020 sejak BUMDes mulai berjalan kita membuka pintu untuk masyarakat untuk bisa berjualan disekitar Pantai Ngebum, tujuanya apa? agar itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Terbukti setelah itu banyak dari warga masyarakat yang berbondong-bondong ke BUMDes untuk membuka usaha di Pantai. Apa yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes sudah cukup baik, tinggal bagaimana temen-temen BUMDes mempertahankan tren positif ini, Insyaallah kami dari Pemerintah Desa selalu mendukung dengan sepenuh hati.” (Wawancara Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibu Rohayah selaku pedagang di Pantai Ngebum dalam wawancara pada 11 Agustus 2023, yang mengatakan :

“Alhamdulillah mas, dulu sebelum saya berjualan disini selama sehari saya cuma untung 100-150, itupun kalo lagi rame mas, sekarang Alhamdulillah bisa meningkat sampe berkali lipat mas.”(Wawancara pada Ibu Rohayah 11 Agustus 2023).

Hal tersebut juga dirasakan oleh Agus pedagang makanan dan minuman di pantai ngebum, yang mengatakan :

“Alhamdulillah kita sekarang tidak bingung lagi kalo warung lagi sepi biasanya kita Cuma balik modal, kalo disini kan selalu rame, jadi Alhamdulillah keuntungan kita jadi bertambah tidak seperti berjualan dirumah.”(Wawancara pada Bapak Agus 11 Agustus 2023).

Hasil wawancara peneliti menunjukkan respon positif dari masyarakat yang berjualan dipantai, rata-rata dari mereka merasakan perubahan yang baik dalam segi pendapatan mereka sehari-sehari, dari sebelum dan sesudah mereka berjualan di Pantai Ngebum.

Gambar 5.15

Aktivitas pelaku usaha di sekitaran pantai ngebum



Sumber : Observasi

Berdasarkan observasi peneliti juga menemukan warung-warung yang berjualan di Pantai Ngebum tidak pernah sepi dari pelanggan, hal tersebut disebabkan karena melonjaknya jumlah wisatawan dari berbagai daerah di Kendal bahkan dari luar Kendal yang bisa mencapai 3000 wisatawan perharinya. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Moroberkah karena adanya peluang ekonomi yang cukup besar.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BUMDes Moroberkah dalam mengelola pantai ngebum. Dalam pengelolaan wisata Pantai Ngebum, BUMDes Moroberkah juga menaungi masalah

tiket karcis. Para petugas karcis merupakan warga Desa Mororejo yang bersedia dan siap untuk menjadi petugas karcis.

Seperti yang diungkapkan oleh Rudi, selaku penjaga karcis di Pantai Ngebum dalam wawancaranya mengatakan :

“Saya dulu nganggur mas, karena saya juga cuma lulusan smp jadi susah sekali nyari kerja. Dulu saya sempat ikut kerja Pak Lik saya di proyek, tapi itu Cuma 1 tahun setelah itu saya dirumah. Nah tahun kemarin saya didatengi sama Mas Faqih untuk jadi tukang jaga karcis disini, ya karena saya juga butuh akhirnya saya mau.”(Wawancara dengan Rudi 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes Moroberkah adalah karena alasan ekonomi. Bekerjasama dengan BUMDes dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang menguntungkan karena dapat memberikan penghasilan kepada mereka. Hal tersebut selaras dengan pandangan Goldsmith bahwa masyarakat akan cenderung berpartisipasi apabila partisipasi tersebut membawa kemanfaatan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat yang menjadi pelaku usaha baik dalam unit pariwisata maupun pengolahan sampah bersedia mengikuti progam BUMDes dikarenakan hal tersebut memberikan keuntungan secara materil kepada mereka. Namun tidak semua masyarakat turut berpartisipasi pada progam BUMDes dengan alasan kebutuhan ekonomi. Dalam unit usaha sampah, masyarakat turut bersedia berpartisipasi dengan membayar sebesar 15.000 rupiah kepada BUMDes dengan manfaat yang mereka dapatkan berupa kebersihan dan kesehatan lingkungan. Artinya sebagian kecil masyarakat mororejo khususnya pelaku usaha di BUMDes Moroberkah berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, sedangkan sebagian besar masyarakat mororejo partisipasi mereka dilandaskan kepada alasan lingkungan dan kesehatan.

C. Adanya hubungan *patron-client*

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Mororejo. Hal tersebut disebabkan oleh figur Bapak Mustofa Kamal yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Mororejo. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa Bapak Mustofa Kamal adalah figur yang baik, sehingga mendorong masyarakat untuk mendukung beliau selama menjadi Kepala Desa Mororejo. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Thohirin Ketua RW 05 yang mengatakan :

“Kebanyakan warga RW 05 itu suka sama pak Mustofa Kamal, tapi tidak tau dengan warga RW lain, karena Pak Kamal kan warga sini jadi kalau ada bantuan atau yang semacamnya kita selalu diutamakan, kaau ada kegiatan juga kaya agustusan itu beliau selalu mendukung secara memberi uang atau membelikan makanan buat yang kerja bakti. Jadi masyarakat senang ikut progam-progam beliau termasuk BUMDes Moroberkah ini” (Wawancara Bapak Thohirin 3 Agustus 2023).

Pendapat tersebut didukung oleh Triyanto selaku Ketua BPD Desa Mororejo yang mengatakan bahwa :

“Iya mas, Kalau untuk kegiatan desa sendiri warga RW 05 paling semangat dan paling banyak jumlahnya biasanya dengan RW lain. Soalnya mereka lebih dekat dengan Pak Lurah, kan Pak Lurah warga situ juga. Mereka juga terlihat lebih diutamakan daripada masyarakat dari RW lain ya karena memang basisnya pak kades ya disana itu.” (Wawancara Bapak Triyanto 6 Agustus 2023)

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan lurah. Dimana masyarakat khususnya RW 05 menganggap figur Bapak Kamal merupakan figur yang baik, dan dekat dengan masyarakat khususnya RW 05, sehingga menjadi sebuah alasan masyarakat ikut serta dalam pengembangan BUMDes Moroberkah.

Hasil penelitian ini menemukan adanya pola hubungan yang saling terikat antara pejabat pemegang kekuasaan dalam hal ini Kepala Desa Mororejo dengan masyarakat mororejo terutama RW 05. Peneliti menemukan bahwa dalam partisipasi masyarakat Desa Mororejo dalam Pengembangan BUMDes Moroberkah terdapat hubungan antara *patron* dan *klien*. Patronase atau yang dapat diartikan sebagai pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat yang didistribusikan dengan mekanisme tertentu kepada pemilih (E. Aspinall, 2015). Sedangkan Definisi klientelisme merupakan kriteria distributif dukungan pemilihan yang membedakan sifat klien dari strategi politik berorientasi material berupa proyek, pemberian barang, donatur yayasan kepada komunitas pemilih (Stokes, 2009).

Diketahui bahwa Kepala Desa Mororejo Bapak Mustofa Kamal memiliki kecenderungan untuk memberikan perhatian lebih kepada warga RW 05 yang merupakan basis pemilih dan tempat tinggalnya dibandingkan dengan RW lain. Dalam kegiatan yang diadakan oleh RW 05, Kepala Desa Mororejo kerap memberikan dukungan baik secara materil dengan uang, atau dengan menyediakan konsumsi bagi warga. Hal tersebut diketahui tidak pernah dilakukan oleh Kepala Desa Mororejo terhadap RW lain. Adanya hubungan tersebut memicu partisipasi masyarakat RW 05 dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa., sehingga warga RW 05 selalu mengikuti kegiatan desa termasuk kegiatan BUMDes dengan masa yang lebih banyak dibandingkan warga RW lain. Hasil penelitian tersebut tentunya berbeda dengan teori Goldsmith yang tidak memuat adanya hubungan *patronase klientelisme* di dalam faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Proses partisipatif menjamin kontrol masyarakat.

Proses partisipasi harus menjamin kontrol masyarakat, setidaknya usulan dan saran dari masyarakat dipertimbangkan untuk membuat sebuah keputusan, walaupun tidak sepenuhnya usulan dari masyarakat tersebut dapat dipenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Triyanto selaku ketua BPD Desa Mororejo, ia mengatakan:

“Masyarakat diundang dalam rapat-rapat BUMDes, itu bukan hanya sekedar untuk rame-rame saja, tapi harapannya mereka mampu memberikan masukan pada suatu hal yang dibahas di dalam rapat tersebut. Setidaknya itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari BUMDes sebelum melaksanakan usahanya.”(Wawancara pada Triyanto 6 Agustus 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Thohirin selaku ketua RW 05, dalam wawancaranya ia mengatakan :

“Kehadiran masyarakat itu sangat berpengaruh mas, bahkan beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan desa kita itu banyak yang menyerap usulan dari masyarakat. Termasuk dalam membahas mengenai BUMDes ini, Jadi kita tau anggarannya berapa, buat apa aja, terus siapa yang mau jalan, jadi kita bisa memantau.”(Wawancara pada Bapak Thohirin 3 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan BUMDes Pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan harus menjamin hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap mekanisme pembangunan desa. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Mororejo dalam wawancara yang mengatakan :

“Sejauh ini masyarakat sudah banyak terlibat mas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi selalu kita libatkan, Harapannya apa? biar gak terjadi penyelewengan, karena memang anggaran BUMDes ini kan besar sekali, jadi masyarakat harus bisa ikut mengawasi” (Wawancara Kepala Desa Mororejo 3 Agustus 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengembangan BUMDes Moroberkah menjamin hak-hak masyarakat desa untuk ikut serta dalam mengontrol dan memberikan aspirasinya dalam pengembangan BUMDes Moroberkah. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan adanya kontrol

dari masyarakat desa, meminimalisir terjadinya penyelewangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian di atas sama selaras dengan pandangan Goldsmith tentang partisipasi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat menjamin kontrol masyarakat di dalam proses pembangunan desa. Masyarakat Desa Mororejo terlibat dalam proses pengembangan BUMDes Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berkontribusi besar di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah, walaupun kontribusi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran di dalam pengembangan BUMDes Moroberkah terbilang kurang maksimal, setidaknya masyarakat mengetahui informasi-informasi penting seperti anggaran perencanaan, mekanisme pelaksanaan, dan hasil kebijakan yang juga disepakati oleh masyarakat. Hal tersebut menjamin kontrol masyarakat di dalam proses pengembangan BUMDes sehingga mampu mengantisipasi terjadinya penyelewangan, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu, mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo sudah cukup baik. *Pertama* Masyarakat terlibat mulai dari proses perencanaan program BUMDes melalui rapat Musdes dan rapat triwulan. *Kedua*, masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program BUMDes terutama melalui unit usaha sampah dan unit usaha pariwisata. *Ketiga*, masyarakat Desa Mororejo juga berpartisipasi dalam memberikan kemanfaatan baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat Mororejo, yaitu dengan menambah PAD desa, merawat dan memperbaiki lapangan Desa, dan menggaji guru TPQ, MDTU, serta marbot masjid. Keempat, masyarakat Desa Mororejo juga selalu dilibatkan di dalam rapat evaluasi, dimana disitu merupakan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan kekurangan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

Alasan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes Moroberkah Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu yaitu karena *pertama*, adanya kesadaran dan motivasi dari masyarakat Desa Mororejo. Masyarakat Mororejo memiliki kesadaran bahwa partisipasi mereka diperlukan dalam menyusun program kerja BUMDes Moroberkah, karena kebijakan yang nantinya muncul akan berdampak langsung kepada mereka. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Moroberkah umumnya didasari alasan karena partisipasi tersebut memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. *Ketiga*, faktor kepemimpinan kepala desa juga turut menjadi alasan masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan BUMDes. Figur kepala desa yang dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan pribadi yang baik mendorong masyarakat untuk mendukung segala program pemerintah desa termasuk program BUMDes Moroberkah. Keempat, Keterlibatan masyarakat Desa Mororejo di dalam

pengembangan BUMDes Moroberkah memberikan kewenangan untuk masyarakat turut menentukan nasib mereka kedepan. Artinya masyarakat memiliki kontrol atas dijalkannya progam BUMDes Moroberkah Desa Mororejo.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Mororejo

- a. Bagi Pemerintah Desa Mororejo diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mororejo dalam pengembangan BUMDes melalui LPMD
- b. Meningkatkan kerja sama antara pengurus BUMDes dan masyarakat Pemerintah Desa agar lebih solid dalam memajukan Desa Mororejo.

2. Bagi Pengelola BUMDes Moro Berkah

- a. Pengurus dan pengelola BUMDes Moro Berkah perlu menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes Moroberkah.
- b. Pelayanan dari BUMDes Moro Berkah diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Mororejo.

3. Bagi Masyarakat Desa Mororejo

- a. Masyarakat Desa Mororejo sudah sangat berpartisipasi dalam program pengembangan BUMDes Moro Berkah, alangkah baiknya jika ditambah lagi keaktifan dan kepartisipasiannya supaya program pengembangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- b. Masyarakat diharapkan mampu memotivasi masyarakat lain untuk dapat berpartisipasi dalam program BUMDes Moroberkah.

DAFTAR PUSTAKA

- (2019). *Diambil kembali dari BPS KENDAL*: <https://kendalkab.bps.go.id/>
- (2022). *Diambil kembali dari Si Desa JATENG*:
<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/bumdeskec/33.24.08>
- (2023). *Diambil kembali dari BUMDES MOROBERKAH*:
<https://bumdesmoroberkah.or.id/shop/>
- AA Siad Gatara, M. D. (2007). *Sosiologi Politile. Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Amin, M. (2021). *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jene Madinding Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berkah, M. (2022). *Diambil kembali dari* <https://bumdesmoroberkah.or.id/sejarah/>
- Bhattacharyya, J. (1972). *Adminiftrative organitation for development IIAS*. Brussels.
- Bill Cooke, K. U. (2002). *Katillum: Yeni abair Zorbalik Mil?* Istanbul: Demokrasi Kitapligi.
- Budiharjo. (2017). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Public Administration Journal Vol.1 No. 2 , 177*.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka.
- Cohen, J. M. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. *World Development*, 213–235.

- Daud Bahransyaf, R. P. (2013). *Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication*. Jurnal PKS, 227.
- Dimiyati, M. (1990). *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan Metode, dan Terapan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- ENDAH, K. (2018). *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Moderat, 25-33.
- Ferdinand Kalesaran, V. V. (2015). *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*. e-journal "Acta Diurna" .
- Harjanti Widiastutia, W. M. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 257-288.
- Herman. (2019). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan.
- Hidayati, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 226-240.
- I Kadek Darwita, D. N. (2018). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Locus Majalah Ilmiah FISIP .
- I Wayan Martha Wijaya Kusuma, A. R. (2022). *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik.

- Jajang Abdul Nurhasan, A. H. (2020). *Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu*. ANTARADHIN Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer.
- JM. Cohen, N. d. (1977). *Rural Development Committe: Feasibility and Appllication of Rural Development Participation: A. State -of-the-arth Paper*. New York: Cornel University.
- Kemenkeu. (2021). *Diambil kembali dari https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PMK_222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf*
- Kompas. (2011). *Diambil kembali dari sumber: www.google.co.id*
- Mantra, I. b. (2008). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Matthew. B Miles, A. M. (1994). *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Michael Queen, P. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya Pemberdayaan* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muh. Firyal Akbar, S. S. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*. Jurnal Ilmu Administrasi , 136-140.
- Muhamad Muhamad, S. R. (2022). *Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang (The Role of Bumdes in the Development of Quality and Sustainable Tourism on the Sumbing Slope Temanggun-*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

- Mulyadi, M. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyadi, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid 19*. Info Singkat.
- Nasution, Z. (2009). *Sosiladritas sosial dan partisipasi masyarakat desa transisi*. Malang: Ummi Press.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta.
- Pradnyani, N. L. (2019). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV DERWATI PRESS.
- Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. (Tarmizi, Penyunt.) Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Aminah, R. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Kencana.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Jakarta: Scechia Indonesia.
- Santos, F. M. (2012). *A positive theory of social entrepreneurship*. *Journal of Business Ethics*, 335–351.
- Santoso. (1998). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Sastropoetro. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Statistik, B. P. (2021). *Diambil kembali dari* [. \(https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html\)](https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html)

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiasih, K. (2018). *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Magister Hukum Udayana .
- Sumiasih, K. (2018). *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Suryanto, R. (2018). *Peta jalan BUMDES sukses*. PT Syncore Indonesia.
- Tempo.co. (2020, November 11). *Diambil kembali dari* <https://bisnis.tempo.co/read/1403290/abdul-halim-iskandar-bumdes-kunci-percepatan-ekonomi-des>
- TENGAH, S. J. (2022). *Diambil kembali dari* <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/bumdeskec/33.24.08>
- UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).
- Wibawa, K. C. (2019). *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Administrative Law & Governance Journal.
- Wibowo. (2004). *Globalisasi dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cideras Pustaka.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2242/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023 04 September 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MOROBERKAH DESA MOROREJO KECAMATAN KALIWUNGU" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : M. ANHARUL ASROR
NIM : 1906016125
Semester : IX (SEMBILAN)
Jurusan : ILMU POLITIK
Tempat/ Tgl lahir : KENDAL, 04-11-2002
CP/e-mail : 083838183932
Nama Ayah/ Ibu : JUMAI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DUSUN PONGANGAN 01/03 DESA SIDOMAKMUR

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Ijin Penelitian Kepada BUMDes Moroberkah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2849/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2023 07 November 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Desa Mororejo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan BUMDes**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : M. Anharul Asror
NIM : 1906016125
Semester : IX
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kendal, 04 November 2002
CP/e-mail : 083838183932
Nama Ayah/ Ibu : Juma'i
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pongangan 1/3, Sidomakmur, Kaliwungu Selatan ,Kendal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kasub. bag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Ijin Penelitian Kepada Kepala Desa Mororejo



Gambar Pantai Ngebum Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu



Wawancara dengan Direktur BUMDes MoroBerkah



Wawancara dengan Pengurus BUMDes Moro Berkah Desa Mororejo



Wawancara dengan pedagang di sekitar Pantai Ngebum Desa Mororejo



Wawancara dengan penjaga tiket Pantai Ngebum Desa Mororejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : M. Anharul Asror
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 04 november 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dk. Pongangan
RT 01/ RW 03 Desa Sidomakmur,
Kecamatan Kaliwungu Selatan,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

No. Whatsapp : 083838183932
Email : aantwelve12@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. 2007- 2013 : SDN 2 Kedungsuren
2. 2013- 2016 : SMP NU 06 Kedungsuren
3. 2016- 2019 : MAN Kendal

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Karang Taruna Desa Sidomakmur periode 2023-sekarang
2. Ketua Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Walisongo Semarang periode 2021-2022
3. Wakil Ketua UKM QAI FISIP UIN Walisongo Semarang periode 2021-2022
4. Sekretaris Ansor Desa Sidomakmur periode 2024-sekarang
5. Anggota Ikatan Mahasiswa Kendal Pusat periode 2022-2024